

**PENGEMBANGAN MASYARAKAT
ISLAM DI INDONESIA:
KONTRIBUSI RELIGIUS DAN ETNIS**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf l untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (Satu) tahun dan/atau pidana paling banyak Rp 100.000.000,. (seratus juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana paling banyak Rp 500.000.000,. (lima ratus juta rupiah)
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana ana penjara paling banyak Rp 1.000.000.000,. (satu miliar rupiah)
- (4) Setiap oarng yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud padaayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,. (empat miliar)

**PENGEMBANGAN MASYARAKAT
ISLAM DI INDONESIA:
KONTRIBUSI RELIGIUS DAN ETNIS**

Zaenudin Amrulloh, M.A

PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM DI INDONESIA: KONTRIBUSI RELIGIUS DAN ETNIS

© Sanabil 2022

Penulis: Zaenudin Amrulloh, M.A

Editor : Erwin Padli, M.Hum

Lay Out: Emailist Creative

Desain Cover : Maliki

All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang Undang

Dilarang memperbanyak dan menyebarkan sebagian atau keseluruhan isi buku dengan media cetak, digital atau elektronik untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

ISBN :

15x23 cm

ix, 112 hlm

Cetakan 1 : Desember 2022

Penerbit:

Sanabil

Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram

Telp. 0370- 7505946, Mobile: 081-805311362

Email: sanabilpublishing@gmail.com

www.sanabil.web.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku Referensi ini dengan lancar. Buku ini merupakan salah satu buku referensi dalam pembahasan tentang metode pengembangan masyarakat di Indonesia dengan menyatukan dua identitas yang sering terlihat berseberangan, yaitu identitas religius dan identitas etnis.

setelah membaca buku ini diharapkan bagi para pembaca dan peneliti berikutnya dapat membantu merumuskan dan memecahkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat dengan pertimbangan identitas religius dan identitas etnis. Dengan adanya metode ini diharapkan dapat menjawab persoalan yang tidak jarang dialami oleh masyarakat Indonesia terkait dengan persoalan sosial yang dihadapi oleh masyarakat seperti radikalisme, kekerasan berbasis agama dan budaya, juga konflik yang terjadi berbasis agama dan budaya di Indonesia. Meskipun Indonesia terlihat mudah mengatasi persoalan konflik kepentingan yang dilatarbelakangi oleh persoalan agama dan budaya, namun perlu untuk kita semua, masyarakat Indonesia memiliki sebuah cara pandang pemberdayaan masyarakat.

akhirnya penulis memohon dan berharap yang sangat tinggi agar pembaca maupun peneliti memberikan kritik untuk perbaikan buku di masa yang akan datang. Semoga buku ini menghasilkan buah pikir yang membangun dan bermanfaat.

Mataram, Desember 2022

Penulis

KATA SAMBUTAN
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya, saya dengan senang hati menyambit baik penerbitan buku Pengembangan Masyarakat Islam di Indonesia: Kontribusi Religius dan Etnis yang ditulis oleh Zaenudin Amrulloh, M.A, selaras dengan manfaat yang dapat diperoleh dari hasil tulisannya dan juga memberikan sumbangsih pengetahuan pada disiplin keilmuan pengembangan masyarakat.

Dalam antropologi, jika kita ingin mengerti manusia dapat dipelajari melalui banyak hal seperti aneka warna bentuk fisik, pola masyarakat, atribusi, pemikiran, bahkan mengurai kebudayaannya. Di dalam buku ini, kita dapat mengambil sebuah contoh dalam menilai bagaimana suatu upaya pengembangan masyarakat dapat dilakukan jika dilihat pada pendekatan religius dan pendekatan etnis.

Indonesia sendiri sebagai sebuah negara demokrasi sering menghadapi persoalan-persoalan terkait dengan masyarakat (manusia) yang mana tentu membutuhkan satu pendekatan yang dapat menguraikan dengan rapi bagaimana pengembangan masyarakat secara konsep dan praktis. Di dalam buku ini diuraikan perihal ada satu potensi dalam aspek religius yang dapat menjadi modal penting dalam pengembangan masyarakat. Terlebih Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, maka penting untuk melibatkan aspek religius dalam hal upaya pengembangan masyarakat.

Buku ini memberikan informasi komprehensif tentang konsep pengembangan masyarakat jika dilihat dalam kontribusi nilai-nilai religius dan atas dasar (historis) etnis. Relevansi kedua aspek ini masih menjadi daya tarik dalam kajian-kajian pembangunan sosial,

pengembangan masyarakat, dan sosio-antropologi yang hingga kini masih perlu untuk diteliti dan ditafsirkan secara holistik dan dengan cara yang tepat. Buku ini bisa menjadi awal (barangkali) dalam memulai menguak persoalan-persoalan religius yang sehari-hari telah menjadi habituasi masyarakat Indonesia.

Demikian sambutan saya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita dalam melaksanakan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Sekian dan terimakasih,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mataram, November 2022

Dekan FDIK UIN Mataram

Dr. Muhammad Saleh, M.A

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Sambutan Dekan FDIK UIN Mataram.....	ix
Daftar Isi.....	xi
Bab 1 PENGANTAR DAN METODOLOGI.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Metodologi.....	6
Bab 2 ISLAM DI INDONESIA DAN WARISAN BUDAYA.....	9
A. Pengantar.....	9
B. Warisan Budaya Islam di Indonesia.....	10
C. Agama Islam sebagai Sistem Nilai dan Simbol.....	16
D. Literasi Sains berbasis Nilai Islam dan Budaya.....	20
Bab 3 DIALEKTIKA RELIGIUS DAN ETNIS DI INDONESIA.....	33
A. Pengantar.....	33
B. Dialektika Agama dan Budaya.....	35
C. Interaksi Islam dan Budaya	37
D. Interaksi Islam dan Kesenian.....	41
Bab 4 PENGEMBANGAN MASYARAKAT: KONTRIBUSI RELIGIUSITAS	45
A. Pengantar.....	45
B. Tahap-Tahap Pengembangan Masyarakat Islam.....	51
C. Filsafat dan Ideologi Pengembangan Masyarakat Islam.....	57
D. Kompleks Pengembangan Masyarakat Islam	60
E. Memperkuat Basis Kewirausahaan Masyarakat Islam.....	64
F. Mengembangkan Perekonomian Berbasis Kerakyatan	66
G. Mengembangkan Kepemimpinan Masyarakat.....	70
Bab 5 DISKUSI MENDALAM.....	77
A. Pengembangan Masyarakat untuk Apa?	77
DAFTAR PUSTAKA	103
BIOGRAFI PENULIS	112

Bab 1

Pengantar dan Metodologi

A. Latar Belakang

Pengembangan masyarakat di Indonesia menjadi sebuah kajian berkelanjutan yang tidak dapat berhenti ketika dianggap berhasil menyelesaikan persoalan masyarakat. Konsep yang dimengerti mengenai pengembangan masyarakat yakni suatu upaya meningkatkan kapasitas masyarakat untuk dapat bangkit dari keterpurukan atau proses kerjasama antar masyarakat dengan pemerintah untuk meningkatkan kegiatan sosial dan ekonomi. Bentuk sosial dan ekonomi selalu menjadi kata kunci dalam upaya pengembangan masyarakat yang selama ini dapat kita saksikan. Permasalahan sosial dianggap tidak bisa lepas dari permasalahan ekonomi, begitu pula sebaliknya, permasalahan ekonomi adalah bagian dari permasalahan sosial.

Pengembangan masyarakat merupakan praktik baik yang berimplikasi pada penguatan kapasitas masyarakat untuk dapat berkembang dan secara mandiri mampu menyelesaikan masalah sosial di sekitar. Zubaedi (2013) menerangkan bahwa istilah pengembangan masyarakat memiliki maksud yaitu mengembangkan kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Pengertian ini menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat berimplikasi pada berubahnya kondisi masyarakat dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak produktif menjadi produktif secara berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial.

Adapun batasan lain dari pengertian pengembangan masyarakat diartikan sebagai upaya untuk membentuk masyarakat lapis bawah (*grass root*) supaya memiliki akses dan meningkatkan kesadaran sehingga masyarakat memiliki berbagai pilihan untuk

masa depan mereka. Definisi pengembangan masyarakat secara umum yaitu masyarakat memiliki kemampuan manajerial dalam hidupnya untuk dapat mengatasi masalah yang sehari-hari dapat ditemui. Sedangkan secara khusus, pengembangan masyarakat berarti masyarakat yang mempunyai kesadaran bahwa untuk mengubah kondisi hidup harus melalui upaya-upaya atau *treatment* khusus.

Pengembangan masyarakat sebagai upaya untuk mendorong individu maupun kelompok masyarakat untuk dapat memecahkan permasalahan sosial serta memiliki pilihan nyata yang menyangkut masa depannya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya (Suharto, 2014). Pengertian ini menitikberatkan praktik pengembangan masyarakat pada upaya pemecahan masalah sosial yang ada di sekitar masyarakat dengan tujuan membuat masyarakat sadar bahwa ada pilihan yang menjadi pertimbangan untuk bagaimana mengatur masa depan masyarakat. Lebih lanjut lagi, pengembangan masyarakat memiliki empat prinsip penting dalam praktik pengembangan masyarakat.

Pertama, praktik pengembangan masyarakat harus memihak kepada sebuah kepentingan (*an interest*). Prinsip ini mengedepankan pada upaya untuk mewujudkan nilai-nilai secara nyata dalam kehidupan, dan yang menjadi objek dalam implementasi prinsip ini yaitu pada masyarakat miskin dan penyandang keadilan sosial, hak asasi manusia dan hak kewarganegaraan, pemberdayaan dan penentuan diri sendiri, tindakan kolektif dan keanekaragaman.

Kedua, praktik pengembangan masyarakat harus bersifat partisipatif dan solutif. Prinsip ini bertujuan untuk mengubah struktur masyarakat yang diskriminatif, memaksa dan menindas masyarakat. Sedangkan untuk mencapai tujuan pengembangan masyarakat dalam rangka membangkitkan, menghadirkan informasi yang tidak menyenangkan dan kadang-kadang mengganggu. Pada prinsip ini, kegiatan pengembangan masyarakat berbentuk gerakan

sosial seperti gerakan pada perjuangan hak asasi manusia maupun gerakan perdamaian.

Ketiga, praktik pengembangan masyarakat bersifat membebaskan. Pembebasan atau liberasi adalah reaksi penentangan terhadap bentuk-bentuk kekuasaan, perbudakan, dan penindasan. Pembebasan menuntut pemberdayaan dan otonomi. Pembebasan melibatkan perjuangan menentang dan membebaskan dari orang-orang, ideologi, dan struktur yang berkuasa.

Keempat, praktik pengembangan masyarakat membuat masyarakat mudah dalam mengakses program. Praktik pengembangan masyarakat menempatkan program-program di lokasi yang strategis dapat diakses oleh masyarakat. Lingkungan fisik yang diciptakan melalui pengembangan masyarakat memiliki suasana yang bersahabat dan informal, bukan suasana birokratis, formal dan tertekan

Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki latar belakang etnis dan agama yang heterogen berpotensi untuk melahirkan banyak definisi terkait wacana maupun praktik dalam pengembangan masyarakat sehingga pendekatan-pendekatan dalam kegiatan pengembangan masyarakat tidak semata-mata dapat dinilai dari aspek sosial, ekonomi dan politik semata. Namun kontribusi dari keberagaman latar belakang masyarakat harus dapat menjadi pertimbangan, baik dalam wacana maupun praktik pengembangan masyarakat. Di Indonesia tidak jarang dijumpai beragam konflik yang lahir dari kedua latar belakang tersebut, yakni etnis dan agama. Bahkan konflik yang begitu mendalam pernah terjadi dan dilatarbelakangi oleh kedua faktor tersebut.

Keberagaman agama, etnis dan juga budaya di Indonesia menjadi modal penting dalam pengembangan masyarakat. Selain menjadi modal yang kuat, secara paradoks baik agama, etnis, maupun budaya dapat menjadi sumber masalah jika tidak diantisipasi atau diatur keseimbangan praktiknya dalam kehidupan

masyarakat. Zubaedi (2013) menguraikan bahwa, pengembangan masyarakat merupakan suatu upaya atau kegiatan sosial yang difokuskan untuk memecahkan permasalahan sosial. Masalah sosial merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari, sifatnya yang begitu bebas membuat masalah sosial bisa lahir dan berkembang melewati batas masa dan demografi. Artinya, masalah sosial itu suatu keniscayaan yang tak terelakkan, sekarang masyarakat merasa baik-baik saja, besok bisa muncul masalah sosial yang baru. Atau, masalah sosial yang baru saja dapat di atas, di kemudian hari bisa lahir masalah baru dari hal yang sempat diselesaikan tadi.

Terkait dengan masalah sosial, Indonesia sebagai negara yang memegang teguh nilai demokrasi memiliki sejumlah pengalaman terkait dengan penyelesaian masalah sosial. Beberapa dekade belakangan ini, diskursus mengenai pembangunan sosial dianggap sebagai salah satu cara dalam merespons masalah sosial. Kita tidak perlu kembali ke masa yang sangat jauh seperti masa paska-kemerdekaan Indonesia, meskipun masalah sosial yang terjadi di masa tersebut dapat dinilai sebagai suatu embrio dalam peradaban bangsa Indonesia. Namun, zaman sungguh sangat cepat berlalu dan diskursus pengembangan masyarakat kian masa semakin berkembang.

Kita coba urai kembali pada masa reformasi, sebuah masa yang dianggap sebagai loncatan jauh pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Di masa sebelumnya Indonesia mengalami banyak sekali masalah sosial, dari kemiskinan hingga pelanggaran nilai kemanusiaan. Runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 membuka lembaran baru bagi demokrasi bangsa Indonesia, yang tidak hanya lembaran baru yang terbuka namun segudang persoalan muncul baik dengan antisipasi yang kuat dan ada juga dengan tanpa antisipasi yang matang, salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang hingga saat ini masih menjadi tugas besar oleh pemerintah. Di saat bersamaan kemiskinan

di dunia mengalami banyak perubahan, baik dalam pendekatan maupun dalam mengkategorikan kemiskinan.

Sebelum jauh berbicara mengenai kemiskinan, ada hal yang penting untuk dibicarakan yaitu identitas masyarakat Indonesia. Identitas yang dalam hal ini didefinisikan sebagai sebuah status sosial yang dapat menggambarkan perilaku, pola hidup, idealisme, dan cara pandang masyarakat Indonesia. Banyak sekali kategori identitas sosial jika ingin diuraikan, namun dalam buku ini kita akan mempersempit identitas sosial tersebut ke dalam identitas etnis dan identitas religius.

Identitas etnis memiliki pengertian yaitu (Pinney 1992) suatu kontrak yang kompleks yang mencakup komitmen dan perasaan kebersamaan pada suatu kelompok, evaluasi positif tentang kelompoknya, adanya minat dan pengetahuan tentang kelompok, serta keterlibatan dalam aktivitas sosial dari kelompok. Sedangkan identitas religius lebih pada gambaran perilaku dan pandangan masyarakat yang dipengaruhi oleh pandangan agama tertentu baik secara normatif maupun dogmatif.

Indonesia sendiri sebagai suatu negara yang berdiri di atas nilai demokrasi yang tentunya hal ini mendukung berkembangnya beragam etnis dan *background* agama yang bermacam-macam melahirkan corak sosial yang abstrak. Konflik sosial tidak hanya terjadi oleh sebab perbedaan pandangan politik semata-mata, namun dalam hal yang bersamaan konflik sosial dapat terjadi oleh sebab perbedaan pandangan dalam hal etnis dan agama. Konflik di ambon, di Poso, konflik masyarakat Madura dan Suku Daya, merupakan gambaran dari konflik sosial yang dilatarbelakangi oleh etnis. Sedangkan dalam aspek identitas religius, konflik sosial yang terjadi lebih halus dan jarang ada yang memakan korban jiwa. Meskipun begitu, hal ini tidak dapat dipandang sebelah mata namun memerlukan pandangan yang lebih arif supaya di kemudian hari dapat melahirkan solusi.

Untuk menengahi persoal tersebut, upaya pengembangan masyarakat harus dapat menyesuaikan dirinya dengan corak masyarakat Indonesia. Dan oleh sebab itu, perlu rumusan masalah yang strategis dan metodologi yang cocok supaya dapat menjawab konflik-konflik sosial yang terjadi di Indonesia. Sehingga pertanyaan penting yang dapat kita lempar adalah, bagaimana strategi pengembangan masyarakat di Indonesia yang dapat dilakukan dengan melihat latar belakang dari identitas etnis dan identitas religius.

B. Metodologi

Untuk menjawab persoalan di atas perlu disusun suatu metodologi penelitian komprehensif sehingga persoalan tersebut dapat terurai secara ilmiah. Dengan begitu, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *history (Historical approach)*. Data akan dikumpulkan dengan pendekatan *lieteratur review* baik melalui media cetak dan media elektronik, data-data ini kemudian akan dicocokkan dengan realita yang tergambar pada saat penelitian ini dilakukan. Sedangkan pendekatan *history (Historical approach)* akan mencoba menguraikan secara rinci bagaimana sejarah masyarakat Indonesia.

Objek material dalam studi ini yaitu konsep dan praktik pengembangan masyarakat yang sudah dirancang sejak dulu baik oleh para ilmuwan maupun para akademisi. Model penelitian ini dipilih untuk mengetahui, menampilkan dan mengkaji sebuah pemahaman fokus pada pemikiran pengembangan masyarakat tentang bagaimana pengembangan masyarakat yang dilatarbelakangi oleh nilai-nilai religiusitas dan identitas sosial (khususnya etnis). Adapun objek formal dalam penelitian ini adalah perspektif filsafat sosial dan juga filsafat politik sebagai sebuah metode berpikir yang sering digunakan oleh para ilmuwan dan akademisi sosial.

Pikiran-pikiran yang ada di dalam pandangan para ilmuwan maupun para akademisi, walaupun masih bersifat “umum” dan

merupakan sebuah “generalisasi” tetap memiliki *singularitas* sebagai sebuah pihak subjek tertentu. Dan pandangan mereka dapat dinilai sebagai perbandingan dengan suatu latar belakang atau pemahaman umum (transedental), yang dapat memberikan kedudukan padanya dalam keseluruhan skala visi-visi tentang kenyanitaan (Kristeva, 2015).

Adapun sasaran dalam penelitian ini, yaitu:

1. *Pengembangan masyarakat*, suatu paradigma keilmuan yang memiliki tujuan untuk mengubah suatu kondisi hidup masyarakat kecil yang memiliki segala keterbatasan (akses dan peluang) untuk dapat menentukan hidup mereka sendiri menjadi kehidupan yang lebih baik. Konsep dan praktik mengenai pengembangan masyarakat yang sudah lahir sejak abad ke 20 tersebar ke berbagai negara dengan latar belakang yang berbeda, dan juga menghasilkan input maupun output yang berbeda. Untuk itu perlu diuraikan secara praktis dan memiliki relevansi yang kuat terhadap berbagai subjek negara untuk dapat merumuskan sendiri bagaimana praktik dan juga konsep pengembangan masyarakat yang sesuai dan relevan.
2. *Religius*, suatu pandangan yang menggambarkan bagaimana kehidupan manusia itu dipengaruhi oleh nilai-nilai agama. Religius menjadi faktor yang utama dalam bagaimana masyarakat dengan pemeluk agama hidup dan mengatur tingkah lakunya yang dibatasi oleh norma-norma dan nilai-nilai agama. Indonesia sendiri sebagai negara yang menomorsatukan keyakinan beragama harus dapat menjadi contoh yang baik dalam mengatur dan menunjukkan bagaimana masyarakat yang ber-religius dapat hidup dan berkembang di dunia.
3. *Etnis*, merupakan sebuah kelas sosial yang bertujuan untuk menilai dan mengelompokkan masyarakat

berdasarkan profil sejarah kelompok masyarakatnya. Etnis menjadi sekat sosial yang nampak nyata dan dapat dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap pilihan hidup seorang masyarakat. Untuk itu, etnis perlu menjadi perhatian dalam bagaimana memajemen masyarakat yang hidup dengan latar suku dan etis yang beragam, seperti Indonesia.

Bab 2

Islam di Indonesia dan Warisan Budaya

A. Pengantar

Berbicara mengenai Islam di Indonesia tidak bisa lepas dari status sebagai sebuah agama yang memiliki jumlah pemeluk terbanyak di Indonesia. Islam merupakan agama dengan pemeluk mayoritas di Indonesia, yang jumlahnya mencapai 231,06 Juta atau 87,2%, diikuti dengan agama-agama lain seperti Protestan 6,9%, Katolik 2,9%, Budha 1,7%, Hindu 0,7% dan Konghucu 0,05% (Profil Agama, indonesia.go.id).

Sebelum berbicara mengenai tingginya jumlah pengikut agama Islam, kita harus menelisik bagaimana Islam masuk dan berkembang di tanah Nusantara, yang disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perkembangan Islam di Indonesia merupakan bagian dari proses yang berkaitan dengan beragama sektor kehidupan lainnya yang begitu sangat kompleks. Untuk sebagian dapat diterangkan melalui keterlibatan kegiatan perdagangan yang berkembang sejak abad XI. Intensitas hubungan-hubungan perdagangan itu selanjutnya menghasilkan tumbuhnya pemukiman masyarakat muslim di pesisir kepulauan Nusantara. Melalui proses sejarah yang begitu sangat panjang, telah cukup alasan untuk menyimpulkan bahwa lambat laun Islam telah menjadi bagian yang begitu menguasai batin masyarakat Indonesia (Haidar, 1994: 4).

Melalui jalur perdaganganlah Islam masuk ke Indonesia, yang pada masa itu terlebih dahulu tatanan sosial masyarakat telah terbentuk sedemikian rupa. Meski demikian, keberhasilan Islam menembus akar kehidupan masyarakat Indonesia tidak berarti menghapus akar lamanya. Tradisi-tradisi asli masyarakat Indonesia dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai Islam yang

terinternalisasi. Pergumulan Islam dengan nilai budaya masyarakat menuntut adanya penyesuaian terus menerus tanpa harus kehilangan ide aslinya sendiri. Sejarah Indonesia dengan sejarah Islam memunculkan realitas baru bagi masyarakat, bahwa tatanan sosial dan budaya diikat dengan nilai-nilai Islami. Meskipun pada awalnya terasa sulit, namun perlahan nilai Islam dan nilai budaya di Indonesia menemukan pola dan ciri khasnya sendiri. Sehingga Islam di Indonesia pada dasarnya memiliki ragam perbedaan dengan Islam yang berkembang di negara lainnya, khususnya di negeri Arab. Wajah Islam di Indonesia memiliki wajah sendiri, yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan negeri lainnya.

Sosialisasi Islam di Nusantara telah mencapai tahap perkembangan sejak abad 13M (iii) dan berlanjut pada abad-abad berikutnya. Islam di Indonesia telah memberikan sumbangsih dalam memperkaya anasir-anasir budaya asli Indonesia yang selanjutnya menjadi basis kebudayaan bangsa ini. Alasan banyaknya sumbangsih Islam terhadap kebudayaan Indonesia adalah nilai-nilai Islam yang disampaikan kepada masyarakat dilakukan dengan cara-cara damai dan oleh para penyebar Islam di Nusantara (baik asing maupun pribumi) memilih anasir budaya lokal sebagai media komunikasi.

B. Warisan Budaya Islam di Indonesia

Islam berasal dari kata salam yang berarti “pasrah”, “damai”, “selamat”. Kata Islam secara lengkap berasal dari kata *aslama, yuslimu, islam*, yang mempunyai beberapa arti, yaitu: (1) melepaskan diri dari segala penyakit lahir dan batin, (2) kedamaian dan keamanan, dan (3) ketaatan dan kepatuhan. Kata Islam disebut delapan kali dalam al-Qur’an, yaitu surah ali-Imran ayat 19 dan 85, surah al-Maidah ayat 3, surah al-An’am ayat 125, surah az-Zumar ayat 22, surah asSaf ayat 7, surah al-Hujarat ayat 17, dan surah at-Taubah ayat 74. Islam merupakan agama samawi yang diturunkan oleh Allah SWT., melalui utusan-Nya Muhammad SAW. yang ajarannya terdapat dalam kitab suci al-Qur’an dan as-Sunah dalam

bentuk perintah-perintah, larangan-larangan, petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Lebih lanjut, Harun Nasution menyatakan bahwa Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai aspek dari kehidupan manusia yang meliputi aspek akidah, ibadah, hukum, tasawuf, filsafat, politik dan pembaruan.

Dari berbagai definisi yang ada Islam dikaitkan dengan keberagaman seseorang, maka ada dua tipe makna al-Islam: ada Islam formal dan *superficial* (yang *lahiriyah* saja) dan menjadi motif sebagian agama yang tidak murni, dan ada Islam yang riil (al Islam al-Haq), yakni Islam yang sebenarnya. Kedua pengertian ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Imran ayat 19. Dari uraian di atas dapat dilihat ada dua penekanan dalam merefleksikan makna al-Islam. Pertama, secara normatif mengandung makna penyerahan secara totalitas. Kedua, bermakna kedamaian dan keselamatan. Seseorang yang memeluk agama Islam, akan merasa damai dengan Tuhan dan damai dengan manusia. Damai dengan manusia akan terwujud setelah penyerahan kepada Tuhan. Penamaan agama dengan al-Islam menunjukkan kepada hakikat dan esensi agama tersebut. Sikap pasrah pada Tuhan bukan hanya merupakan ajaran Tuhan kepada hamba-Nya, tetapi ia diajarkan oleh-Nya dengan dikaitkan dengan alam manusia itu sendiri. Karena sikap pasrah tersebut tuntutan alami manusia, maka agama yang sah tidak bisa lain daripada sikap pasrah kepada Tuhan (al-Islam), yakni semua yang mengajarkan pasrah kepada sang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Esa.

Jadi dalam realitas empirik, al-Islam menunjukkan kepada suatu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Islam adalah nama dari agama wahyu yang diturunkan Allah SWT. Kepada Rasul-rasul-Nya untuk disampaikan kepada manusia. Agama Islam berisi ajaran-ajaran Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Islam dalam

pengertian ini adalah agama yang dibawa oleh para Rasul Allah, sejak nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah wahyu Allah terakhir untuk manusia. Oleh karena itu, agama ini sudah sempurna dan senantiasa sesuai dengan tingkat perkembangan manusia sejak masa diturunkannya, empat belas abad yang lalu hingga akhir peradaban manusia (Suryana, 2007: 30)

Islam diturunkan sebagai pedoman agar manusia dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk serta yang hak dan yang batil. Sejak awal penciptaan manusia, Allah SWT. telah menurunkan agama pada manusia, yang dibawa oleh seorang rasul pada setiap masa tertentu dan untuk bangsa tertentu. Hal itu terus berlangsung sampai datang Muhammad SAW., nabi dan rasul terakhir yang diutus membawa agama bagi seluruh umat manusia dan berlaku untuk sepanjang zaman (Houve, 1994: 247)

Sebagai agama yang melengkapi proses kesinambungan wahyu. Islam memiliki tujuh karakteristik ajaran. Pertama, ajarannya sederhana, rasional dan praktis. Islam adalah agama tanpa mitologi. Islam membangkitkan kemampuan berpikir dan mendorong manusia untuk menggunakan penalarannya (Q.S. 39: 9, Q.S. 6: 98, Q.S. 2: 269). Di samping itu, Islam tidak mengizinkan penganutnya berpikir dengan teori kosong, tetapi diarahkan pada pemikiran yang aplikatif (QS. 13: 3).

Kedua, kesatuan antara kebendaan dan keruhanian. Islam tidak membagi kehidupan atas dua bagian, yaitu material dan spiritual. Menurut pandangan Islam, kemajuan spiritual hanya dapat dicapai bila manusia berada di tengah manusia lain di dunia dan keselamatan spiritual baru dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber daya material (Houve, 1994: 247)

Ketiga, Islam memberi petunjuk bagi seluruh segi kehidupan manusia meskipun sebagian petunjuk bersifat umum (Q.S. 2: 208). Keempat, keseimbangan antara individu dan masyarakat. Islam

mengakui keberadaan manusia sebagai individu dan menganggap setiap orang memiliki tanggung jawab pribadi kepada Tuhan, bahkan Islam menjamin hak-hak asasi individu dan tidak mengizinkan adanya campur tangan orang lain di dalamnya (Q.S. 53: 39). Namun di lain pihak, Islam mengembangkan rasa tanggung jawab sosial dalam diri manusia dan menyerukan individu-individu untuk memberi andil dalam membina kesejahteraan masyarakat (Q.S. 51: 19).

Kelima, keuniversalan dan kemanusiaan. Islam ditunjukkan untuk seluruh umat manusia. Tuhan dalam Islam adalah Tuhan sekalian alam (Q.S. 1: 2) dan Muhammad SAW adalah rasul Tuhan untuk seluruh umat manusia (Q.S. 7: 158 dan Q.S. 21: 107). Dalam Islam, seluruh umat manusia adalah sama, apa pun warna kulit, bahasa, ras atau kebangsaannya (Houve, 1994: 247)

Keenam, ketetapan dan perubahan. al-Qur'an dan sunah yang berisi pedoman abadi dari Tuhan tidak terikat oleh batasan ruang dan waktu, bersifat abadi. Namun pedoman tersebut sering kali bersifat umum atau secara garis besar, sehingga memberikan kebebasan pada manusia untuk berijtihad dan mengaplikasikannya pada setiap kondisi masyarakat. Ketujuh, al-Qur'an sebagai pedoman suci umat Islam yang telah berumur sekitar lima belas abad, tetapi terjamin kesucian dan kemurniannya.

Agama adalah sistem kepercayaan (iman) yang diwujudkan dalam sistem perilaku sosial para pemeluknya. Ia berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun kelompok sehingga setiap perilaku yang diperankannya akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianutnya. Perilaku individu dan sosial digerakkan oleh kekuatan dari dalam yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama yang menginternalisasi sebelumnya. Oleh karena itu, keagamaan yang bersifat subjektif, dapat diobjektifkan dalam pelbagai macam ungkapan, dan

ungkapan-ungkapan tersebut memiliki struktur tertentu yang dapat dipahami.

Begitu pun dengan agama Islam yang berisi tentang sistem kepercayaan/iman yang diwujudkan dalam sistem perilaku sosial para pemeluknya. Ia berkaitan dengan pengalaman manusia baik sebagai individu maupun kelompok sehingga setiap perilaku yang diperankannya akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianutnya. Islam adalah agama yang berkarakteristikan universal, dengan pandangan hidup mengenai persamaan, keadilan, kebebasan dan kehormatan serta memiliki konsep teosentrisme yang humanistik sebagai nilai inti (*core value*) dari seluruh ajaran Islam (Kuntowijoyo, 1991:229)

Masyarakat Indonesia mengakui dirinya sebagai bangsa yang berbudaya dan memegang teguh nilai-nilai peradaban terutama yang tertuang dalam nilai Pancasila. Hal ini membentuk satu karakter masyarakat Indonesia yang tidak *bebas nilai* (seperti kebanyakan masyarakat di berbagai bangsa lainnya). Masyarakat Indonesia mengaku mempercayai nilai Pancasila dan terutama sekali nilai Bhineka Tunggal Ika. Barangkali hal ini yang membuat Indonesia memiliki sejarah konflik antar suku dan agama yang kecil. Namun di balik itu, peran Islam dalam memberikan pengaruh tidak dapat diabaikan begitu saja. Islam hadir dengan cara yang lembut (damai) mengajarkan masyarakat untuk bagaimana mengelola perdamaian dengan cukup baik.

Warisan budaya Islam di Indonesia menjadi salah satu bukti bagaimana manajemen kebudayaan di Indonesia sangat kuat dengan nilai Islam. Para seniman Nusantara mengemas seni-seni bernafaskan keislaman menjadi sebuah seni Islam Nusantara yang kemudian menjadi basis kebudayaan atau kepribadian bangsa Indonesia. Kontribusi Islam terhadap entitas budaya nasional antara lain (Ambary, 1998:17):

1. Aksara dan budaya;
2. Arsitektur peribadatan yang mengadaptasi rancangan bangunan lokal;
3. Seni tulis tinggi (kaligrafi);
4. Tradisi hidup bersih dan mengharamkan barang najis/kotor;
5. Tradisi pendidikan pesantren;
6. Teknologi maritim dalam pelayaran; dan
7. Adaptasi sistem kalender Hijriah.

Seni mengubah banyak elemen dalam kehidupan manusia. Seni menjadi sebuah kebudayaan yang mampu mengubah semua segmen kehidupan manusia, mulai dari kebutuhan dasar hidup hingga gaya hidup manusia disusupi oleh seni. Terutama di Indonesia, seni memiliki banyak pengaruh dalam perkembangan masyarakat. Peradaban masyarakat Indonesia bisa kita petakan dari seni yang berkembang. Pada bagian ini, perlu untuk melihat perkembangan seni Islam yang diadaptasi oleh masyarakat Indonesia pada masa awal perkembangannya menjadi sebuah negara yang teratur dan terorganisir.

Karya *Islamic heritage* di Indonesia dalam hal pembangunan masjid merupakan salah satu permulaan seni Islam. Pada masa Indonesia-Islam muncul bangunan yang kemudian disebut sebagai masjid, secara umum berarti tempat diri untuk bersujud (menyembah Allah). Bentuk masjid kuno di Indonesia pada umumnya denahnya berbentuk bujur sangkar, di bagian depan/sisi lainnya terdapat serambi, dan sebuah ruang menjorok ke luar pada sisi barat sebagai mihrab. Pola dasar itu kiranya masih serupa dengan bentuk masjid yang pernah dibangun oleh masyarakat muslim di tanah kelahirannya yaitu di Quba pada tahun 622M (Ambary, 1998:18). Hingga kini perkembangan bentuk masjid di Indonesia masih belum keluar dari pola yang lama, hanya sedikit sentuhan bentuk bangunan modern yang tidak mengubah sama sekali bentuk awal sebuah masjid.

Selain masjid, model makam di Indonesia juga sedikit-banyak dipengaruhi oleh seni Islam. Makam di Indonesia sistem penguburan/symbol kuburan bagi seorang muslim, di atas permukaan tanah tokoh yang dikuburkan dibuat tanda yang berbentuk bangunan persegi panjang dengan hiasan *maesan* di sisi utara dan selatan.

C. Agama Islam sebagai Sistem Nilai dan Simbol

Al-Qur'an dalam surah al-Baqarah ayat 148 mengakui bahwa masyarakat terdiri atas berbagai macam komunitas yang memiliki orientasi kehidupan sendiri-sendiri. Manusia harus menerima kenyataan keragaman budaya dan agama serta memberikan toleransi kepada masing-masing komunitas dalam menjalankan ibadahnya. Oleh karena itu kecurigaan tentang sifat Islam yang antiplural, sangatlah tidak beralasan dari segi ideologis. Bila setiap muslim memahami secara mendalam etika pluralitas yang terdapat dalam al-Qur'an, tidak perlu lagi ada ketegangan, permusuhan dan konflik dengan agama-agama lain, selama mereka tidak saling memaksakan.

Selanjutnya di dalam Islam kita mengenal adanya konsep tauhid, suatu konsep sentral yang berisi ajaran bahwa Tuhan adalah pusat dari segala sesuatu, dan bahwa manusia harus mengabdikan diri sepenuhnya kepada-Nya. Konsep tauhid ini mengandung implikasi doktrinal lebih jauh bahwa tujuan kehidupan manusia tak lain kecuali menyembah kepadaNya.

Doktrin bahwa hidup harus diorientasikan untuk pengabdian kepada Allah. Inilah merupakan kunci dari seluruh ajaran Islam. Dengan kata lain, di dalam Islam, konsep mengenai kehidupan berpusat kepada Tuhan. Sistem nilai tauhid mendasarkan diri pada pandangan semacam ini.²²

Menurut Islam, manusia harus memusatkan diri kepada Tuhan, tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan manusia sendiri, atau disebut sebagai humanisme teosentris yang merupakan nilai inti dari seluruh ajaran Islam. Dari tema inilah muncul sistem simbol, sistem

yang terbentuk karena proses dialektik antara nilai dan kebudayaan. Misalnya dalam al-Qur'an, kita mengenal adanya rumusan amr ma'ruf nahyi munkar, yaitu perintah untuk menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Dari rumusan itu kita bisa melihat adanya dua proses yang sekaligus berlawanan tetapi sekaligus merupakan satu kesatuan: emansipasi dan pembebasan.

Dalam konteks ini seluruh sistem simbol yang muncul dari rumusan amr ma'ruf nahyi munkar ditujukan untuk serangkaian gerakan pembebasan dan emansipasi. Nahyi munkar, atau mencegah kemungkaran berarti membebaskan manusia dari semua bentuk kegelapan (zhulmat) dalam berbagai manifestasinya. Dalam bahasa ilmu sosial ini juga berarti pembebasan dari kebodohan, kemiskinan, ataupun penindasan. Sementara, amr ma'ruf yang merupakan langkah berangkai dari gerakan nahyi munkar, diarahkan untuk mengemansipasikan manusia kepada amr, kepada cahaya petunjuk Ilahi, untuk mencapai keadaan fitrah. Fitrah adalah keadaan di mana manusia mendapatkan posisinya sebagai makhluk yang mulia.

Dari nilai inti humanisme teosentris, Islam telah menginspirasi lahirnya gerakan pembebasan dan emansipasi. Tapi kendatipun demikian, gerakan pembebasan dan emansipasi ini sesungguhnya juga tumbuh dari suatu prinsip dialektis lain yang disebut tazkiyah. Tazkiyah adalah usaha rasional manusia beriman yang berorientasi filosofisnya adalah humanisme teosentris untuk selalu membersihkan diri atau meningkatkan kualitas ruhaninya secara terus menerus. Demikian pula dengan ekspresi simbolis dari karya-karya Muslim, seperti kesenian, kesusastraan dan hasil-hasil budaya lainnya, pada dasarnya juga mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai sentral Islam itu melalui prinsip tazkiyah.

Islam menjadi nilai sangat penting bagi wilayah pengembangan kebudayaan, Islam bisa dilihat dari sejarah maju mundurnya pada masa pembaharuan dalam sejarah, Islam sangatlah menjadi titik

utama bagi pengkajian-pengkaji kebudayaan dalam Islam. Kebudayaan sering dikaitkan dengan adanya sejarah Islam yang berada di wilayah tempat tersebut. Karena para pengembang Islam lari ke wilayah-wilayah yang diperlukan umat Islam untuk lebih maju, dan tidak mengabaikan budaya yang sedang berada di wilayah tersebut. Maju mundurnya umat Islam dalam tataran historis sebagaimana telah disebut pembaharuan dalam Islam yang disebut modern dan mempunyai tujuan untuk membawa umat Islam kepada kemajuan sebelum masuk ke dalam pokok masalah, ada baiknya diuraikan terlebih dulu sejarah Islam secara ringkas, bukan hanya untuk mengetahui waktu mulanya periode Modern itu, tetapi juga untuk melihat perkembangan maju mundurnya umat Islam yang terjadi dalam sejarah peradaban. Jika dilihat dari masa periode sejarah Islam, dapat dibagi ke dalam tiga periode besar yaitu: klasik, pertengahan dan modern.

Islam merupakan agama yang hidup dalam sebagian besar masyarakat Indonesia. Bukan itu saja, Islam adalah satu ideologi. Islam bukan semata-mata satu agama dalam arti hubungan manusia dengan Tuhan (*habluminallah*). Islam mengandung dua unsur. Unsur hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, dan unsur hubungan manusia dengan sesama makhluk. Unsur ibadah dan muamalah. Islam mempunyai kaidah, mengenai soal ibadah, yakni hubungan manusia dengan Tuhan, semua dilarang kecuali yang diperintahkan. Islam memberikan dasar-dasar untuk mengatur hidup keduniaan yang bersifat abadi.²⁶ Islam jika dilihat secara sejarah sejak kelahirannya, tersimpul dalam sabda Nabi Muhammad SAW., “Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan nilai-nilai akhlak yang baik.” Maka jika Islam menjadi dasar negara, dengan sendirinya ia akan segera melihat dan memeriksa apa nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat. Islam datang dengan teguran al-Qur’an, “Janganlah kamu bertolong-tolongan atas dosa dan bermusuhan-musuhan.” Islam mengatur nilai dalam tatanan hidup bagi manusia dengan nilai demokrasi atau musyawarah.

Islam hanyalah salah satu sekian mata rantai peradaban umat manusia. Oleh karena itulah, sumbangan Islam harus diberikan dalam kerangka kebersamaan dengan semua pihak, bukan menyendiri di luar sejarah. Islam memperlihatkan pertalian dengan pandangan hidup lainnya dalam tatanan universal. Sejarah Islam merupakan masa berkembangnya pemikiran yang paling subur yang paling pernah dilalui alam pikiran budaya manusia. Ia melahirkan pemikiran di segala bidang pemikiran budaya yang masa kini masih tetap hidup dan berkembang memengaruhi alam pikiran sikap dan perilaku umat Islam. Islam bukan hanya pencipta perkembangan politik, ekonomi sosial yang luar biasa dalam sejarah, tetapi juga pencipta alam pikiran keilmuan dan filsafat. Ia melahirkan dan mengembangkan pemikiran keagamaan yang berdasarkan wahyu, juga pemikiran yang berkaitan dengan filsafat dan ilmu pengetahuan kemanusiaan pada umumnya. Jadi budaya Islam di samping mengembangkan pemikiran agama, juga mengembangkan segala aspek pemikiran kemanusiaan yang menghidupkan dan memberikan fasilitas pada warisan sebelum Islam.

Islam lahir di Semenanjung Arabia pada abad ke-6 Masehi. Pada awal kehadirannya, ia mengalami hambatan kultur sebab lahir di tengah masyarakat nomaden dan tidak berperadaban (*vacuum cultural*). Dalam perkembangan selanjutnya, penyebaran telah menakjubkan para ahli sejarah. Sebab, dalam jangka yang relatif pendek Islam telah dianut oleh penduduk yang mendiami setengah wilayah dunia. Oleh karena itu, sebagai sistem ajaran keagamaan yang lengkap, Islam memberi tempat pada dua jenis penghayatan keagamaan. Pertama, eksoterik (*zahiri*), yaitu penghayatan keagamaan yang berorientasi pada formalitas atau pada norma dan aturan-aturan keagamaan yang ketat. Kedua, esoterik (*bathini*), yaitu penghayatan keagamaan yang berorientasi dan menitikberatkan pada inti keberagamaan dan tujuan beragama.

Islam diakui sebagai agama yang ajarannya mengandung muatan universal, yang mencakup sebagai dimensi, baik dimensi-

dimensi lainnya. Karena keuniversalitasannya tersebut, ketika berbicara soal aliran Islam dan wacana sosial, kerap kali kita berjumpa dengan pembicaraan tentang bagaimana universalitas Islam tersebut dapat ditransformasikan dalam kehidupan manusia. Berbagai format alternatif pun kemudian dimunculkan oleh para pemikir muslim.

D. Literasi Sains Berbasis Nilai Islam dan Budaya

Islam sebagai agama yang lengkap lagi paripurna (Alquran 2: 111-112; 3:19, 85, 102; 5:3) juga terkait dengan integrasi Islam dan sains merupakan sebuah keniscayaan (Abdullah, 2013) meski semua ini sudah dari lama menjadi sebuah wacana yang belum sampai pada implementasi yang menyeluruh. Terkait hal ini (Mulyono, 2011) menguraikan bahwa pandangan tentang integrasi Islam dan sains yang telah muncul sejak lama dalam kehidupan masyarakat, namun banyak yang menganggap bahwa hubungan Islam dan sains merupakan dua entitas yang jauh berbeda, padahal Islam sendiri yang dipandang dari segi ideologis dapat diyakini memiliki sifat yang universal (Moqoyyidin, 2014) merupakan sebuah dasar dari kehidupan manusia yang mengatur secara lengkap dan sempurna.

Jika mengkaji dari sisi filsafat, kita akan menemukan konsep sains, Islam, dan budaya saling terhubung pada kajian tentang *The New Philosophy of Science* (Abimbola, 1983; Clark, 1993). Kajian ini menelusuri proses kerja keilmuan sains dari berbagai aspeknya, mulai aspek logis, aspek sosiologis, aspek historis, dan aspek antropologi. Karena proses kerja sains ternyata terkait dengan beberapa aspek tersebut, maka sains merupakan produk pemikiran, produk sosial, produk sejarah, produk budaya, dan bahkan sebagai manifestasi keimanan (Muslih, 2010). Ketika masyarakat ilmunan dunia melihat konsep integrasi antara sains-Islam-budaya bermula dari kajian *The New Philosophy of Science*, maka akan banyak melahirkan wacana tentang integrasi-interkoneksi keilmuan.

Pada tahun 1958, Paul Hurd menemukan frasa “Scientific Literacy” pertama kalinya untuk mengetahui pendapat atau ide dan kesadaran publik Amerika tentang pengetahuan akan sains (Laugksch, 2000). Setelah itu (dalam dekade yang sama), literasi sains menjadi fokus dari komunitas ilmuwan Amerika sebagai bentuk keingintahuan mereka akan dukungan publik untuk merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Uni Soviet dengan diluncurkannya Sputnik. 59 tahun setelah Hurd, pembahasan tentang literasi sains meluas, yang awalnya hanya pendapat atau ide dan kesadaran tentang pengetahuan akan sains (sebatas konteks), kini OECD (2016) mendefinisikan Literasi Sains adalah kemampuan untuk terlibat dengan ilmu pengetahuan (sains) pada masalah terkait dan dengan ide-ide (gagasan) sains sebagai refleksi warga negara.

Jika memperhatikan frasa “... sebagai refleksi warga negara”, kita akan menyadari bahwa literasi sains ternyata hanya sebatas kesadaran sebagai warga negara saja, padahal seorang warga negara (misal: Warga Negara Indonesia) adalah seseorang yang (mayoritas) beragama Islam dan tentunya berbudaya. Sehingga, artikel ini akan memperluas definisi literasi sains menurut OECD (2016) menjadi “... sebagai refleksi sebagai warga negara yang beragama dan berbudaya”.

Refleksi sebagai warga negara yang beragama dan berbudaya ini sangat penting, karena erat kaitannya dalam menanggapi dan terlibat dalam pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang belakangan ini yang tidak diimbangi dengan kesadaran beragama dan berbudaya, sehingga mengakibatkan rusaknya moral dan tatanan sosial dalam masyarakat (Hadiawati, 2008; Hajaroh, 1998; Widiastuti, 2013; Mubah, 2011). Untuk lebih memperdalam pembahasan tersebut, maka artikel ini akan mendiskusikan tentang (1) Bagaimana model literasi sains berbasis nilai-nilai Islam dan Budaya Indonesia? (2) Bagaimana Literasi Sains dapat berkontribusi terhadap kesadaran beragama (Islam) dan berbudaya Indonesia?;

dan (3) Adakah isu terkait tentang literasi sains, Nilai-nilai Islam, dan Budaya Indonesia?

Apakah Literasi Sains Itu?

Definisi literasi sains semakin berkembang setelah Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menjalankan PISA (Programme for Internasional Student Assessment) sejak tahun 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, dan tahun 2015 (siklus tiga tahunan). Pada tahun 2015 PISA mendefinisikan Literasi Sains adalah “the ability to engage with science-related issues, and with the ideas of science, as a reflective citizen.”

(OECD, 2016). OECD (2016) menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki literasi sains bersedia untuk terlibat dalam wacana tentang sains dan teknologi memerlukan kompetensi sebagai berikut:

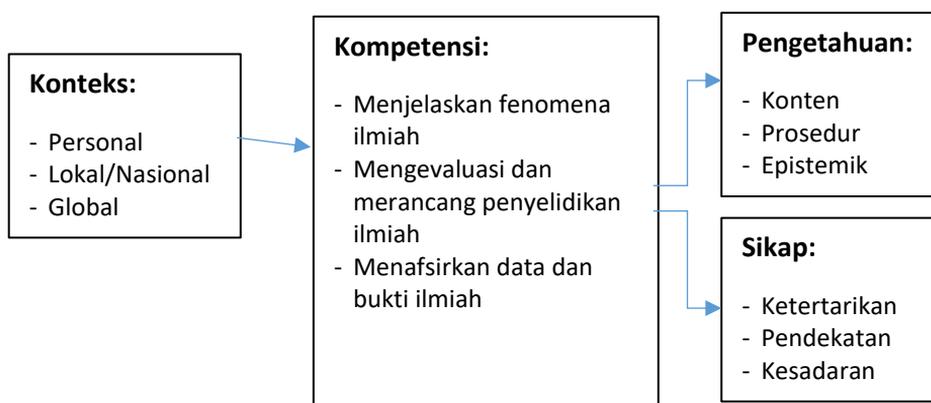
1. Menjelaskan fenomena secara saintifik – mengenali, menawarkan dan mengevaluasi penjelasanpenjelasan berbagai fenomena alam dan teknologi.
2. Mengevaluasi dan mendesain penyelidikan secara saintifik – menjelaskan dan menilai penyelidikan ilmiah dan mengusulkan cara mengatasi pertanyaan ilmiah.
3. Menafsirkan data dan bukti secara saintifik – menganalisis dan mengevaluasi data, menyimpulkan dan berargumen dalam berbagai representasi dan menjelaskan konklusi yang tepat dari sains

Seperti pada PISA tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2015 juga terdapat 4 aspek yang menjadi kerangka dari literasi sains, yaitu Contexts, Knowledge, Competencies, dan Attitudes, keempat aspek tersebut saling terkait (Gambar 1).

1. Contexts – pribadi, lokal/nasional dan isu-isu global, baik sekarang maupun lampau yang menuntut beberapa pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Knowledge – pemahaman tentang fakta-fakta utama, berupa konsep dan teori yang membentuk dasar dari pengetahuan ilmiah.
3. Competencies – kemampuan untuk menjelaskan fenomena ilmiah, mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, dan menafsirkan data dan bukti ilmiah.
4. Attitudes – seperangkat sikap terhadap ilmu pengetahuan yang ditandai dengan minat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, menilai pendekatan ilmiah untuk menyelidiki mana yang tepat, serta persepsi dan kesadaran akan masalah lingkungan.

Gambar 1. Keterkaitan antar Empat Aspek Literasi Sains (OECD, 2016)



Konsep literasi sains pada kerangka ini mengacu pada pengetahuan tentang sains dan teknologi, meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki tujuan yang berbeda, yaitu proses (sains) dan produk (teknologi). Teknologi berupaya untuk mencari solusi optimal terhadap masalah manusia, sebaliknya, sains mengupayakan jawaban untuk pertanyaan spesifik tentang dunia material sebagai bahan pembentuk teknologi yang optimal (OECD, 2016; Asyhari & Hartati, 2015).

Berdasarkan hal tersebut OECD (2016) juga menjelaskan bahwa literasi sains juga tidak hanya membutuhkan konsep dan teori dari sains, tetapi juga pengetahuan tentang prosedur dan cara yang umum, berhubungan dengan penyelidikan sains dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan pada sains yang lebih kompleks. Sehingga, seseorang yang memiliki literasi sains memiliki pengetahuan dari banyak konsep dan ide yang membentuk dasar pemikiran dari ilmu pengetahuan dan teknologi, bagaimana pengetahuan diturunkan pada sains-teknologi, dan sejauh mana pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan penjelasan teoretis.

Nilai-Nilai Islam

Sumber utama ajaran Islam adalah Al Quran dan As Sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad. Menurut Amsari (1995), nilai-nilai Islam adalah sekumpulan dari prinsip hidup yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, yang mengajarkan manusia tentang cara yang seharusnya ditempuh untuk menjalankan kehidupan di dunia ini. Nilai-nilai tersebut harus dapat ditransformasikan dalam kehidupan manusia (Rahmat, 2004). Selanjutnya Rahmat (2004) menjelaskan bahwa dalam Islam terdapat dimensi tauhid, syariah, dan akhlak. Namun secara garis besar, nilai Islam lebih menonjol dalam wujud nilai akhlak. Menurut Abdullah Darraz dalam Langgulang (1992) yang dikutip oleh Rahmat (2004), Nilai-nilai Islam terbagi dalam lima jenis, yaitu: 1) Nilai-nilai akhlak perseorangan; 2) Nilai-nilai akhlak keluarga; 3) Nilai-nilai akhlak sosial; 4) Nilai-nilai akhlak dalam negara; 5) Nilai-nilai akhlak agama.

Al-Qardawi dalam Halstead (2007) mengklasifikasi nilai akhlak menjadi enam kategori, yang menunjukkan rentang nilai-nilai etika yang diharapkan dalam kehidupan seorang muslim: akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada komunitas atau masyarakat, akhlak kepada hewan, akhlak kepada lingkungan, dan akhlak kepada sang Maha Pencipta, Allah SWT.

Sejalan dengan itu, Halstead (2007) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa terdapat tiga nilai pokok dalam Islam, yaitu (a) akhlaq, yang mengacu pada perintah dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh syariat dan dalam ajaran Islam pada umumnya; (b) adab, yang mengacu pada perilaku yang memelihara hubungan dengan baik; dan (c) kualitas karakter yang dimiliki oleh seorang muslim yang baik, mengikuti contoh dari Nabi Muhammad SAW

Nilai-Nilai Budaya Indonesia

Sastrosupono (1982) menjelaskan bahwa kebudayaan Indonesia adalah puncak-puncak kebudayaan suku. Kebudayaan Indonesia juga merupakan suatu sintesis dari berbagai macam budaya suku, sehingga melahirkan sesuatu yang baru. Adapun indikator budaya Indonesia adalah (1) bahasa nasional, (2) Pancasila, (3) Undang-undang Dasar 1945, (4) pembangunan dan modernisasi Indonesia, (5) lagu-lagu nasional, dan (6) karya seni nasional.

Walaupun ada banyak budaya di Indonesia, akan tetapi terdapat nilai-nilai utama (core value) dari budaya bangsa Indonesia yang dominan. Nilai-nilai utama tersebut didasarkan pada kriteria bahwa nilai-nilai itu harus diterima dan diamalkan baik dalam sikap maupun perilaku sebagian besar rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut adalah (a) harmonis, (b) toleransi, (c) gotong royong, (d) religius, (e) prasaja, (f) musyawarah untuk mufakat, (g) kesatria, dan (h) dinamis. (Sarwono, 1998; Demartoto, 2010). Demartoto (2010) juga menambahkan bahwa nilai-nilai budaya tersebut juga mendasari pola tindak sistem sosial budaya Indonesia.

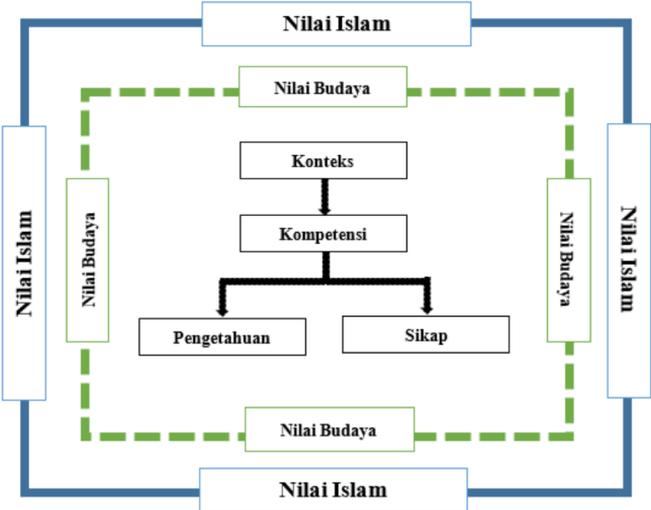
Pada perkembangannya, kebudayaan yang beragam pada masyarakat juga dikenal dengan kearifan lokal (local wisdom), yang bermakna kebijakan setempat, pengetahuan setempat (local knowledge), atau kecerdasan setempat (local genius). Kearifan lokal adalah bagian dari budaya Indonesia (Wagiran, 2012) yang mempengaruhi masyarakat setempat dalam mengelola lingkungan, sumber daya alam (menjadi obat, makanan, peralatan bertani,

berkebun, dsb.), hubungan sosial, pengendalian bahaya gempa bumi (pendekatan arsitektur bangunan) dan menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Suhartini, 2009; Wagiran, 2012; Alus, 2014; Wikantiyoso & Tutuko, 2009; Yunus, 2014).

Literasi Sains berbasis Nilai-Nilai Islam dan Budaya Indonesia

Kerangka yang dikembangkan oleh OECD (2016) tentang Literasi Sains, memungkinkan adanya integrasi nilai-nilai religius dan lokal yang dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah mengelaborasi literatur dan menganalisisnya, kemudian dengan mengambil pendekatan integrasi interdisipliner yang dikembangkan oleh Drake & Burns (2004), yang menjelaskan bahwa tipe ini memungkinkan guru untuk menyatukan keahlian, pengetahuan, atau bahkan sikap/tindakan. Maka model integrasi interdisipliner pada Literasi Sains Berbasis Nilai-nilai Islam dan Budaya Indonesia dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Model Integrasi Literasi Sains berbasis Nilai Islam dan Budaya



Seperti yang dapat kita lihat pada Gambar 2, Nilai-nilai Islam dan Budaya melingkupi literasi sains dengan keempat aspeknya. Nilai Islam menjadi nilai terluar yang melingkupi semua sebagai sesuatu yang sangat fundamental dan diberi garis warna biru tidak terputus agar menjelaskan bahwa nilai tersebut membawa kedamaian dan mengikat.

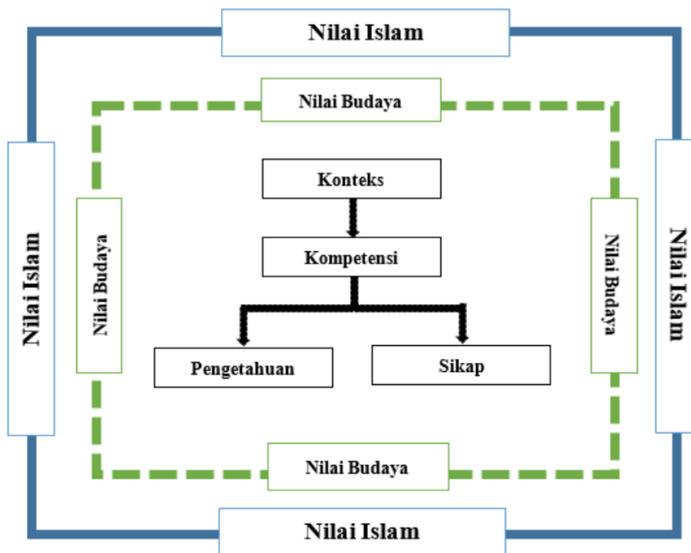
Nilai budaya diberi garis warna hijau terputus-putus agar menjelaskan bahwa nilai ini tidak mengikat sekuat nilai agama, namun menjadi nilai kedua yang menjadi tolak ukur kesadaran sebagai pribadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Singkatnya, seseorang yang memiliki literasi sains tinggi, akan diikuti dalam baiknya pemahaman terhadap nilai-nilai religi dan budaya yang diimplementasikan dalam tindakan yang sesuai dengan tuntutan agama (Allah dan Rasul-Nya) dengan menjunjung tinggi nilai budaya yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Nilai-nilai tersebut, dalam praktiknya ditransfer melalui pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai, karena menurut Nasution (Rahmat, 2004), teori ini menonjolkan penyajian pengalaman belajar seperti yang dicita-citakan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Selain itu, nilai-nilai tersebut tidak diajarkan, tetapi dikembangkan (Kemendiknas, 2010) yang mengandung makna bahwa nilai-nilai tersebut tidak diajarkan seperti bahan ajar pada umumnya, namun melekat dalam proses dan evaluasi pembelajaran.

Aspek Konteks Literasi Sains berbasis Nilai Islam dan Budaya Indonesia

Pada aspek konteks, literasi sains (Tabel 1), PISA 2015 mengangkat isu tentang kesehatan dan penyakit, sumber daya alam, kualitas lingkungan, bahaya, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan meninjau personal, lokal /nasional, dan Global.

Gambar 2. Model Aspek Konteks Literasi Sains berbasis Nilai dan Budaya



Tabel 1. Penilaian Literasi Sains pada Domain Konteks dalam PISA 2015 (OECD, 2016)

	Personal	Lokal/Nasional	Global
Kesehatan dan Penyakit	Pemeliharaan kesehatan, kecelakaan, dan nutrisi	Pengendalian penyakit, hubungan sosial, pemilihan makanan, kesehatan masyarakat	Epidemi, penyebaran penyakit yang dapat membahayakan
Sumber Daya Alam	Konsumsi energi dan bahan-bahan SDA secara pribadi	Pemeliharaan populasi manusia, kualitas hidup, keamanan, produksi dan distribusi makanan, suplai energi	Energi terbarukan dan tidak terbarukan, pertumbuhan populasi, penggunaan berkelanjutan oleh makhluk hidup
Kualitas Lingkungan	Lingkungan yang bersahabat, penggunaan dan pembuangan bahan-bahan dan alat-alat	Distribusi populasi, pembuangan sampah, imbas pada lingkungan	Keragaman hayati, keberlanjutan ekologi, pengendalian polusi, produksi dan hilangnya kesuburan tanah
Bahaya	Penilaian risiko dari gaya hidup	Perubahan tiba-tiba (Seperti: gempa bumi, cuaca buruk), perubahan lambat dan terus menerus (seperti erosi pantai, sedimentasi), penilaian risiko	Perubahan iklim, dampak dari komunikasi modern.
Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aspek saintifik dari hobi, teknologi pribadi, aktivitas musik dan olahraga	Bahan-bahan baru, perangkat dan proses, modifikasi genetik, teknologi kesehatan, transportasi	Kepunahan spesies, eksplorasi ruang angkasa, asal dan struktur alam semesta

Gambar 2 adalah permodelan aspek konteks dari literasi sains yang berbasis nilai-nilai Islam dan Budaya Indonesia. Sebagai ilustrasi singkat, kesehatan dan penyakit menurut Islam, dipandang sebagai ujian dari Allah SWT. Dapatkah hamba yang diberikan kesehatan mampu memanfaatkan saat sehat sebelum sakitnya untuk beribadah kepada Allah SWT, dan apabila sakit, apakah hamba tersebut mampu bersabar selama sakitnya. Sedangkan secara budaya, Indonesia memiliki nilai kearifan lokal dalam menyikapinya. Ada banyak kajian tentang prosedur dan pengobatan tradisional yang menjadi sarana untuk menjaga kesehatan ataupun mengobati berbagai macam penyakit (AHN, 2009). Secara personal, lokal, global, jika seseorang komunitas masyarakat memahami kesehatan dalam konteks nilai-nilai Islam dan Budaya, maka kesehatan dapat terpelihara dan penyakit dapat dicegah dengan baik.

Sumber daya alam Indonesia yang melimpah merupakan sebuah nikmat yang sangat besar, sehingga Allah SWT mengingatkan untuk selalu bersyukur dalam setiap nikmatnya. Konteks bersyukur yang seharusnya dilakukan adalah menggunakan sumber daya alam sewajarnya dan mengedepankan prinsip konservasi sehingga sumber daya alam yang tersedia dapat terpelihara sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan. Dalam kajiannya tentang kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam mengelola sumber daya alam, Suhartini (2009) menguraikan nilai-nilai budaya beberapa suku di Indonesia yang menjadi prinsip dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Islam sangat memperhatikan kualitas lingkungan hidup, terutama kebersihan, sehingga seorang muslim yang memahami agamanya, tentu ia akan senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian diri dan lingkungannya. Kajian oleh Sukenti (2008) dan Sufia, Sumarmi, & Amirudin (2016) tentang kearifan lokal dan peranannya terhadap pelestarian lingkungan menemukan konsep yang sangat kaya atas nilai-nilai budaya agar dapat terciptanya kebersihan, terjaganya keragaman hayati,

kesuburan tanah, polusi yang terkendali, dan terjaganya kesuburan tanah.

Pada isu kebahayaan, Islam memandang hal tersebut sebagai ujian dan cobaan, karena sudah takdir Allah dan manusia harus bersabar dan berserah diri; dan juga musibah, karena banyak disebabkan oleh perbuatan tangan manusia sendiri yang tidak bisa menjaga keharmonisan hubungannya dengan alam. Sedangkan nilai-nilai budaya memegang peranan sebagai usaha manusia untuk mencegahnya. Hal ini ditunjukkan dengan ditemukannya konsep arsitektur masyarakat Indonesia sebagai nilai kearifan lokal sehingga mencegah kebahayaan secara tiba-tiba (karena banjir, gempa bumi, cuaca buruk) (Wikantiyoso & Tutuko, 2009). Islam dan budaya Indonesia memandang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan sebagai pemersatu bangsa, dalam ungkapan lain, nilai-nilai Islam dan Budaya Indonesia menjaga agar hubungan manusia dengan Allah dan manusia tetap terjaga.

Indonesia adalah negara yang sangat agamis, sila pertama yang berbunyi, “Ketuhanan yang Maha Esa” sebagai buktinya. Sedangkan wujud implementasi dari sila pertama yang menjadi dasar ini, dijelaskan pada sila-sila berikutnya, kedua s.d. kelima. Sehingga, cita-cita luhur bangsa yang tertuang dalam Pancasila adalah mengajak rakyat Indonesia untuk mengenal Allah SWT., dan mengimplementasikan ketaatan itu dalam bentuk nilai-nilai budaya yang secara singkat dijelaskan pada sila-sila berikutnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin menuntut kesadaran setiap manusia untuk terlibat terhadapnya, sehingga wacana atau gagasan terkait model literasi sains yang berbasis nilai-nilai Islam dan Budaya Indonesia dapat dimaknai dengan kemampuan untuk terlibat dengan ilmu pengetahuan (sains) pada masalah terkait dan dengan ide-ide (gagasan) sains sebagai refleksi sebagai warga negara yang beragama dan berbudaya. Gagasan

tentang literasi sains berbasis nilai-nilai Islam dan Budaya Indonesia masih membutuhkan kajian yang lebih mendalam, baik melalui diskusi, seminar-seminar, maupun penerapan agar lebih aplikatif, yaitu dapat dikembangkan perangkat penilaiannya, dengan harapan gagasan ini menjadi salah satu konsep dalam tema integrasi sains dan Islam.

Bab 3

Dialektika Religius dan Etnis di Indonesia

A. Pengantar

Pada aspek sosial dan politik di Indonesia sepanjang sejarahnya tidak bisa melepaskan diri dari simbol agama dan etnis. Kedua hal tersebut mewarnai perjalanan dialektika bermasyarakat penduduk Indonesia. Agama dan “keturunan” dalam beberapa dekade belakangan ini menjadi barang dagang yang laris terutama dalam panggung politik. Sehingga tidak naif jika masyarakat lebih terbuai dengan *gimmick* profil etnis dan agama seseorang jika ingin mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia dibandingkan dengan latar belakang yang lainnya (elektabilitas, kompetensi, pengalaman, dll).

Hal ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat akan agama dan etnis masih menjadi modal penting dalam eksistensi masyarakat. Agama dan etnis bisa jadi merupakan dua entitas yang berbeda, namun dalam praktiknya kedua entitas ini dapat berjalan bersamaan bahkan dapat menjadi titik bias yang sering melahirkan banyak perdebatan. Sebagai contoh, munculnya narasi “Islam Nusantara” yang dilatarbelakangi oleh adanya upaya penyadaran kepada umat muslim di Indonesia bahwa Islam yang tumbuh dan berkembang di Indonesia merupakan satu paduan daripada nilai Islam dan nilai lokal. Sehingga Islam di Indonesia bisa jadi terlihat berbeda (dalam beberapa aspek) dengan Islam di negara lain.

Konjungsi ini ternyata melahirkan perdebatan panjang antara kelompok Islam kiri dan kelompok Islam kanan. Pandangan yang membedakan Islam yang tumbuh dan berkembang di berbagai negara dilihat sebagai suatu upaya yang menenggelamkan eksistensi Islam. Sehingga lahirnya wacana “negara Islam”, sebagai upaya perlawanan pada akulturasi nilai Islam dan nilai lokal. Hal ini semakin diperburuk dengan wajah Islam yang ingin ditampilkan di

publik sebagai gerakan “teror” yang melawan liberalisasi agama. ISIS menjadi salah satu contoh “teror” Islam yang dinilai oleh publik dapat mengganggu stabilisasi suatu negara, khususnya negara demokrasi.

Indonesia sendiri telah lama dan masih tetap berjuang untuk menekan angka terorisme yang terjadi di negeri ini. Aksi terorisme yang sering muncul dengan balutan simbol agama Islam, seperti pria berjenggot dengan celana cingkrang, perempuan dengan busana tertutup (niqab) selalu menjadi pandangan yang tidak asing bagi pelaku teror. Meski tagar #Islambukanteroris mengemuka di berbagai media cetak dan elektronik, namun sebagai sebuah simbol yang dekat dengan nilai Islam, hal ini tidak dapat dengan begitu saja diabaikan.

Agama merupakan petunjuk Ilahi yang diturunkan kepada manusia agar memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Agama merupakan sumber rujukan bagi penganutnya dalam segala tindak tanduknya. Sebagai sumber nilai, agama menuntut pemeluknya agar mematuhi segala nilai yang ada sebagai ibadah. Agama lahir ditengah-tengah masyarakat yang telah memiliki kebudayaan. Kebudayaan secara substansial merupakan hal yang esensial dalam kehidupan suatu masyarakat. Setiap masyarakat betapapun sederhananya tetap memiliki kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa mereka. Kebudayaan mengandung nilai, norma, dan pandangan hidup suatu bangsa (Tylor, 1971).

Kebudayaan itu merupakan blue-print yang telah menjadi kompas dalam perjalanan hidup manusia, ia menjadi pedoman dalam tingkah laku. Pandangan semacam ini mengharuskan untuk merunut keberlanjutan kebudayaan itu pada ekspresi simbolik individu dan kelompok, khususnya dalam meneliti proses pewarisan nilai itu terjadi karena kebudayaan merupakan pola dari pengertian dan makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol dan ditransmisikan secara historis. Kenyataan ini yang juga turut

memberikan kontribusi kepada masyarakat Indonesia yang menjadikan bhinneka sebagai falsafah hidup bersama di negara ini (Abdullah, 2010).

Kebhinnekaan masyarakat secara otomatis memiliki bhinneka dalam budaya. Setiap masyarakat daerah memiliki kebudayaan tersendiri yang sesuai dengan nilai pandang masyarakat yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat tersebut. Kebudayaan suatu daerah seringkali menjelma dalam bentuk nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi budaya lokal. Budaya lokal seringkali disebut kearifan lokal (local genius) yang dapat diartikan secara keseluruhan meliputi dan mungkin malahan dapat dianggap sama dengan apa yang dewasa ini terkenal dengan cultural identity dan yang diartikan sebagai identitas atau kepribadian budaya suatu bangsa, yang mengakibatkan, bahwa bangsa bersangkutan menjadi lebih mampu menyerap dan mengolah pengaruh kebudayaan yang mendatanginya dari luar wilayah sendiri, sesuai dengan watak dan kebutuhan pribadinya (Subadio, 1986). Interaksi antara agama dan budaya telah melahirkan keragaman budaya Indonesia.

B. Dialektika Agama dan Budaya

Agama di sini tidak boleh dipahami sebagai dogma dan sistem moral an sich, tetapi perlu dilihat sebagai fenomena kehidupan manusia. Sebab, agama pada hakikatnya bukan nilai-nilai yang ditujukan bagi dirinya sendiri, tetapi agama justru menanamkan nilai-nilai sosial bagi manusia, sehingga agama merupakan salah satu elemen yang membentuk sistem nilai budaya. Agama dapat memberikan sumbangan nyata terhadap pembentukan sistem moral maupun norma sosial masyarakat. Nilai-nilai agama menjadi pedoman dalam berbagai tindakan dan pola perilaku manusia serta nilai-nilai agama dapat dikonstruksi menjadi nilai-nilai budaya, yang diyakini dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat (Paisun, 2010)

Lebih lanjut, Geertz menyebutkan bahwa agama sebagai sistem kebudayaan merupakan pola bagi tingkah laku yang terdiri dari

serangkaian aturan, rencana, dan petunjuk yang digunakan manusia dalam mengatur setiap tindakannya. Demikian juga kebudayaan dapat dimengerti sebagai pengorganisasian pemahaman yang tersimpul dalam simbol-simbol yang berhubungan dengan ekspresi tingkah laku manusia. Karena itu, agama tidak hanya bisa dimengerti sebagai seperangkat nilai di luar manusia, tetapi juga merupakan sistem pengetahuan dan sistem simbol yang dapat melahirkan pemaknaan (Syam, 2007)

Sebagai sistem pengetahuan, agama merupakan sistem keyakinan yang memuat nilai-nilai ajaran moral dan petunjuk kehidupan yang harus ditelaah, dipahami, dan kemudian dipraktekkan oleh manusia dalam kehidupannya. Nilai-nilai agama dapat membentuk dan mengkonstruksikan perilaku manusia dalam kesehariannya (Paisun, 2010). Sementara itu, agama sebagai sistem simbol dapat dipahami bahwa dalam agama terdapat simbol-simbol yang berguna untuk mengaktualisasikan ajaran agama yang dipeluknya, baik simbol-simbol dimaksud berupa perbuatan, kata-kata, benda, sastra dan sebagainya.

Dapat dipahami bahwa antara kebudayaan dan agama mempunyai simbol-simbol dan nilai tersendiri. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan pada Allah swt. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol di mana manusia diharapkan bisa hidup di dalamnya. Dalam hal ini, agama memerlukan sistem simbol, yang berarti agama memerlukan kebudayaan agama walaupun keduanya perlu dibedakan. Agama adalah sesuatu yang final, universal, dan abadi. Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif, dan tentatif. Agama tanpa adanya kebudayaan hanya dapat berkembang sebagai agama pribadi. Karena itu, kebudayaan agama dapat melahirkan kolektivitas (Paisun, 2010).

Dalam proses dialektika antara budaya dan agama itu telah terjadi proses rekonstruksi identitas, baik dalam hidup beragama

maupun berbudaya. Sejalan dengan hal ini, ada proses adaptasi budaya pendatang terhadap budaya setempat yang menyangkut adaptasi nilai dan praktik kehidupan secara umum. Kebudayaan lokal dapat menjadi kekuatan baru yang memperkenalkan nilai-nilai terhadap budaya pendatang. Namun demikian, proses reproduksi kebudayaan lokal, tempat setiap kebudayaan melakukan penegasan keberadaannya sebagai pusat orientasi nilai suatu masyarakat, dapat mempengaruhi mode ekspresi setiap budaya yang ilahi (Abdullah, 2008).

Asep Permana Bahtiar memandang bahwa dialektika agama dan budaya termasuk dalam kategori pengertian budaya sebagai kata kerja, karena dalam proses dialektika tersebut pada dasarnya telah terjadi kerja budaya atau proses kreatif berbudaya dalam umat beragama. Hasil dari dialektika ini adalah agama yang berwawasan budaya (Bahtiar, 2003). Lebih lanjut, Bahtiar menyatakan: bahwa apabila yang dimaksud dengan budaya itu dalam pengertian kata benda, dialektika agama dan budaya tersebut bisa melahirkan sintesis budaya yang berwawasan agama. Dialektika model ini yang biasa diberlakukan pada budaya lokal. Dalam prosesnya, dialektika agama dan budaya dapat melahirkan ketegangan kreatif. Ketegangan kreatif biasa dipahami sebagai dinamika kehidupan beragama yang selalu bergerak menuju kepada kemajuan yang lebih baik, sehingga melahirkan agama yang berwawasan budaya dan budaya yang berwawasan agama

C. Intekasi Islam dengan Budaya

Dalam pandangan Richard Niebuhr (Niebuhr, 1951) respon yang muncul dalam dialektika agama Islam dan budaya ada lima macam yaitu:

1. Agama mengubah kebudayaan
2. Agama menyatu dengan kebudayaan
3. Agama mengatasi kebudayaan
4. Agama dan kebudayaan bertolak belakang

5. Agama mentransformasikan kebudayaan

Respons pertama merupakan pandangan penganut muslim yang mengatakan bahwa satu satunya pedoman hidup manusia adalah Islam. Kelompok ini menolak segala bentuk kepercayaan tradisi dan budaya yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam walau sekecil apapun. Ajaran Islam adalah satu-satunya pedoman hidup dan kehidupan manusia. Pandangan ini melahirkan sikap keberagaman yang eksklusif. Mereka meyakini bahwa Islam adalah agama yang telah mengatur segala aspek kehidupan manusia, karena itu tidak diperlukan lagi ideologi, kepercayaan dan budaya yang lainnya. Mereka biasa disebut kaum puritan dan dalam istilah Clifford Geertz disebut kaum santri.

Respons kedua adalah pandangan bahwa agama sejalan dengan kebudayaan. Pendapat inilah yang melahirkan sinkretisme agama, yaitu membaurkan pengamalan agama dengan ke- budayaan (tradisi). Praktik-praktik keagamaan/kepercayaan sebelum Islam tetap diamalkan dan ditambah dengan nuansa keislaman. Pemujaan terhadap tempat-tempat keramat dan keyakinan terhadap benda-benda sakti tetap dipraktikkan disertai dengan nuansa keislaman. Mereka adalah pengamal sinkretisme.

Respons ketiga berpandangan bahwa agama mengatasi kebudayaan. Pendapat ini berdasarkan bahwa Islam adalah agama yang bertujuan untuk membimbing manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Sehubungan dengan itu, Islam tidak menolak segala praktik kepercayaan, tradisi dan budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka berpandangan bahwa manusia dianugerahi akal oleh Allah untuk digunakan berikhtiar agar kehidupannya menjadi lebih baik dan tidak gersang dalam bentuk budaya. Mereka kebanyakan terdiri dari muslim intelektual.

Respons keempat, yaitu pandangan yang mempertentangkan agama dan budaya. Agama dan budaya tidak dapat dipertemukan karena medan cakupan keduanya berbeda. Agama untuk menjamin

keselamatan manusia, selama manusia mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh. Untuk mencapai keselamatannya, ia harus mengamalkan agama dengan cara menyucikan diri melalui pengamalan yang intensif dengan menafikan keterikatannya dengan dunia. Peningkaran terhadap dunia hanya bisa dicapai melalui kesuciaan jiwa, mereka ini secara umum merupakan penganut golongan tarekat tertentu. Kenyataan ini juga diakui oleh Akhmad Rifa'i dan Agus Dwiyanto yang mengatakan bahwa Islam di Indonesia pada umumnya memiliki orientasi mistik. Dan respons terakhir yang berpendapat bahwa agama memiliki fungsi transformator bagi kehidupan manusia. Pandangan ini berpijak dari pemahaman bahwa agama adalah pedoman yang memberi arah bagi aktivitas manusia, sehingga tindak tanduknya memiliki makna. Agama adalah motivator untuk mengubah pola hidup menjadi lebih kreatif. Respons/pandangan terakhir telah dilakukan oleh para penyebar awal Islam di Nusantara dahulu yang telah mentransformasikan budaya masyarakat pra Islam menjadi Islami, minimal tidak bertentangan dengan Islam.

Ketika agama Islam berdialektika dengan budaya lokal telah menyumbangkan keragaman budaya. Dialektika itu kemudian membentuk suatu varian Islam yang khas, seperti Islam Jawa, Islam Madura, Islam Sasak, Islam Minang, Islam Sunda, Islam Bengkulu dan seterusnya. Varian Islam tersebut bukanlah Islam yang tercerabut dari akar kemurniannya, tetapi Islam yang di dalamnya telah berakulturasi dengan budaya lokal (Paisun, 2010).

Dalam akulturasi budaya, Mark R Woodward (2001) memberikan salah satu varian Islam, yakni Islam Jawa yang dikatakan sebagai “Islam juga, hanya saja Islam yang berada di dalam konteksnya yang sudah bersentuhan dengan tradisi dan konteksnya”. Islam Persia, Islam Maroko, Islam Malaysia, Islam Mesir adalah salah satu contoh mengenai Islam hasil dialektika antara Islam yang genuin Arab dengan kenyataan-kenyataan sosial di dalam konteksnya. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa

tidak ada ajaran agama yang turun di dunia ini dalam konteks vakum budaya. Itulah sebabnya, ketika ajaran Islam datang ke lokus ini, maka mau tidak mau juga harus bersentuhan dengan budaya lokal yang telah menjadi seperangkat pengetahuan bagi penduduk setempat.

Dalam hal ini, dapat terjadi proses tarik menarik, bukan dalam bentuknya saling mengalahkan atau menafikan, tetapi adalah proses saling memberi dalam koridor saling menerima yang dianggap sesuai. Agama (Islam) tidak menghilangkan tradisi lokal selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan Islam murni, akan tetapi agama juga tidak membat habis tradisi-tradisi lokal yang masih memiliki relevansi dengan tradisi besar agama (*religious great tradition*) (Syam, 2010).

Hubungan dialektika agama dan budaya lokal dalam pandangan Suryo dapat mengambil bentuk (variant): pribumisasi negoisasi dan konflik (Wahid, 2001) Pribumisasi dalam pandangan Abdurrahman Wahid: bahwa antara agama (Islam) dan budaya mempunyai independensi masing-masing, tetapi keduanya memiliki wilayah tumpang tindih. Tumpang tindih agama dan budaya akan tetap terjadi terus menerus sebagai suatu proses yang akan memperkaya kehidupan dan akan membuatnya tidak gersang. Pribumisasi Islam dengan demikian menjadikan agama dan budaya tidak saling mengalahkan, melainkan berwujud dalam pola nalar keagamaan yang tidak lagi mengambil bentuk autentik dari agama, serta berusaha mempertemukan jembatan yang selama ini memisahkan antara agama dan budaya. Dengan demikian tidak ada lagi pertentangan agama dan budaya (Zubaedi, 2008)

Secara empiris dalam kebudayaan Islam sebenarnya banyak warisan budaya Islam yang tidak murni berasal dari peradaban Islam. Contoh menara masjid, menara berasal dari kata almanarah mengandung arti tempat api sebagai tradisi pemeluk majusi (penyembah api). Sementra itu baju takwa atau koko yang populer

sebagai busana muslim ternyata berasal dari warisan budaya China. Demikian juga sarung sebagai identitas muslim ternyata berasal dari tradisi Birma.

Harus diingat bahwa pandangan hidup suatu masyarakat tidak mungkin diabaikan begitu saja. Karena itu, meskipun suatu keyakinan tampaknya statis, tetapi ia sesungguhnya tetap mengalami perubahan yang kadangkala bersifat fundamental. Berkenaan dengan hal itu, Snouck Hurgronje dengan jeli mengatakan bahwa Islam tradisional di Jawa yang kelihatannya statis dan demikian kuat terbelenggu oleh pikiran-pikiran ulama di abad pertengahan, sebenarnya telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat fundamental, tetapi perubahan-perubahan tersebut demikian bertahap-tahap, demikian rumit dan demikian dalam tersimpan (Hurgronje, 1999).

D. Interaksi Islam dan Kesenian

Wujud dialektis antara agama dengan budaya tersebut juga dapat muncul dalam perwujudan kesenian yang berbentuk upacara dan memiliki nilai-nilai sakral. Kesakralan upacara ini dapat dilihat dari perlengkapan dan tatacara jalannya upacara yang mengandung makna tertentu. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan dan peralatan yang dituangkan dalam bentuk lambang atau simbol upacara yang diadatkan. Hal ini merupakan karya leluhur yang dinilai sebagai warisan, harus dilaksanakan secara turun temurun.

Seni adalah pengejawantahan pengalaman estetika manusia. Kesenian dengan berbagai bentuknya merupakan sebagian bentuk aktualisasi diri manusia. Karena itu boleh dikatakan bahwa seni adalah fitrah manusia. Dalam pandangan Musa Asy'arie (1999): Agama dan seni keduanya sama-sama mampu mentransender cahaya keindahan Ilahi dan tanda-tanda kebesaran-Nya yang terpantul pada ciptaan-Nya. Agama tanpa seni menjadi kering dan seni tanpa agama menjadi vulgar dan tanpa arah (Zainal dan Abidin, 1998)

Pengembangan dakwah Islam melalui kesenian bukanlah hal yang baru. Dalam pengembangan dakwah Islam di tanah air dahulu tidak terlepas dari dunia seni, dapat dilihat dan dibaca pada uraian dakwah Islam oleh wali songo dan sebagainya. Dewasa ini dakwah Islam sudah gersang karena pesan-pesan yang dilontarkan dengan lantang selama ini, terus terang sifatnya hanya menjaga bentuk formal dari Islam, yang sebenarnya tidak didukung oleh kenyataan di belakangnya (Wahid, 1982). Hal ini berkaitan erat dengan kehidupan manusia yang tidak pernah lepas dari dimensi-dimensi keberagaman yang ditunjukkan dalam aspek keharuan melalui kegiatan seni. Dari sini sudah tampak betapa eratnya kaitan antara kegiatan kesenian, baik yang bersifat penciptaan maupun pagelaran dalam kehidupan beragama (Wahid, 1981).

Kesenian tidak pernah lepas dari situasi dan kondisi masyarakat pendukungnya. Kesenian merupakan kreativitas masyarakat yang mendukung hubungan tersebut. Sebagai salah satu hasil kreativitas yang mendukung suatu kebudayaan, kesenian itu sesungguhnya merupakan ungkapan kreativitas dari kebudayaan itu sendiri (Kayam, 1981). Karena kesenian adalah salah satu kreativitas masyarakatnya, maka corak dan ungkapan suatu kesenian akan mengikuti dinamika kehidupan masyarakat.

Semakin dinamis kehidupan suatu masyarakat akan semakin dinamis pula kehidupan keseniannya. Kesenian tidak pernah statis, tetapi senantiasa berubah dan berkembang mengikuti perubahan dan perkembangan dalam masyarakat. Dalam kehidupan yang lebih luas dapat dilihat bahwa kehadiran seni cukup fungsional dalam kehidupan umat manusia secara individual sebagai sarana berekspresi. Secara sosial untuk kepentingan yang berkaitan dengan masalah kepercayaan agama, ekonomi dan lain-lain.

Menarik sekali langgam-langgam keagamaan yang dicetuskan oleh Koentowidjojo: salah satunya adalah langgam estetis. Langgam estetis ialah yang mementingkan aspek emosi, kepuasan beragama

timbul dari nyanyi bersama, upacara- upacara dan hubungan personal sesama umat (Kuntowijoyo, 1983). Lingkup sosial menjadi terbuka dan dengan mudah tampak dari luar. Hasil hubungan sesama warga didukung oleh keharuan bersama ialah proses komunal. Sebagai sebuah teks, musik digunakan sebagai jalan penghubung antara manusia dan Penciptanya (konteks Hakiki). Dengan kata lain, keterkaitan musik dengan bangunan spiritualitas telah menjadi realitas fenomenal dalam hampir semua kebudayaan manusia. Sehubungan dengan itu upacara tabot sebagai kreativitas seni; seni ukir, dan seni musik, memiliki fenomena keharuan sebagai khas sufisme. Musik dan ritual tertentu dapat membawa seseorang mencapai kenikmatan spiritual. Penggunaan kata-kata atau berbagai silabel (dinyanyikan diucapkan atau direnungkan) bertujuan untuk mengingatkan kembali seseorang akan kehadiran Tuhannya (Sakata, 1983).

Contoh kongkrit kita dapat mengamati Sholawatan yang dianggap kontroversi oleh sementara pihak, dewasa ini telah diterima sebagai budaya (seni Islam). Sekarang Sholawatan telah ditampilkan dalam berbagai nada seperti musik Sholawatan model Haddad Alwi, Sholawatan Allah Kiayi Kanjeng oleh Emha Ainun Nazib. Bahkan Sholawatan dalam beberapa kegiatan sebagian umat Islam sesuatu yang harus ditampilkan sebagai pemberi semangat.

Bab 4

Pengembangan Masyarakat: Kontribusi Religiusitas

A. Pengantar

Alquran memiliki tujuan untuk membentuk tatanan masyarakat yang mulia, elegan, berwibawa, adil dan dapat bertahan hidup. Sebagai individu, manusia tidak bisa lepas dari ikatan sosial bermasyarakat, untuk itu Alquran memberikan definisi terhadap kehidupan manusia harus mampu hidup berkelompok/bersosial.

Kitab panutan umat manusia, Al-Qur'an, menghendaki sebuah tatanan masyarakat yang etis dan terbuka, yang di dalamnya wacana egalitarianisme diwujudkan dalam makna yang sesungguhnya. Hal ini bisa dilihat dari kecaman yang diberikan Al-Qur'an terhadap disequilibrium atau ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Al-Qur'anlah yang paling pertama mencela dua aspek yang saling berhubungan erat dalam masyarakat Mekah: politeisme yang dipandang sebagai gejala dari segmentasi masyarakat dan ketimpangan sosial ekonomi yang amat tajam yang ditimbulkan oleh menyuburnya perpecahan di kalangan masyarakat. Kedua aspek ini, pada sejatinya, merupakan setali tiga uang.

Pada saat yang bersamaan, Al-Qur'an juga memperkenalkan wacana egalitarianisme manusia sebagai sesuatu yang substansial, karena di antara makhluk tuhan, hanya manusia yang memiliki keunikan. Sebagian di antara mereka bahkan ada yang merasa lebih unggul dari esbagianlainnya. Klaim emsemacam ini tentu merupakan refleksi dari jalan pikiran yang kurangustahak. Al-Qur'an menyentuh banyak aspek yang berkaitan dengan manusia, baik mengenai komposisi jasad manusia, kedudukan atau fungsi manusia, eistimewaan manusia, kelemahan-kelemahan manusia, seperti tergesa-gesa, elisah, pelit, kufur, keterlaluhan, sangat ingkar, dan tidak tahu diri. Dalam tulisan ini akan dikemukakan sejumlah

aspek yang berkenaan dengan masyarakat, khususnya masyarakat Islam.

Mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Islam. Karena itu, kemiskinan –baik merupakan kemiskinan intelektual maupun material –yang banyak menimpa bangsa Indonesia identik dengan kemiskinan yang menimpa umat Islam. Dari sisi material, misalnya, menurut data terbaru, diketahui setidaknya saat ini ada 80 juta rakyat Indonesia yang masuk dalam kategori miskin, 20 juta diantaranya tidak memiliki daya beli sama sekali (lihat *Harian Kompas*, edisi 7 Agustus 1998, lihat juga *Harian Republika* edisi 18 Desember 1998).

Sementara itu, tidak akan lama lagi, bangsa Indonesia akan menghadapi pasar bebas, AFTA (Asean Free Trade Area) tahun 2003 dan APEC (Asian Pacific Economic Cooperation) tahun 2020. Jelas, bangsa Indonesia adalah salah satu diantara bangsa-bangsa yang paling tidak siap untuk menghadapi konsekuensi keduanya, terutama persaingan pasar bebas nanti.

Ketidaksiapan ini bisa diketahui dari tingkat daya saing yang dimiliki bangsa Indonesia dibanding bangsa-bangsa lain di dunia. Menurut laporan *The World Economic Review*, sebagaimana dikutip Jalaludin Rakhmat (1997: 376), dari tahun ke tahun daya saing bangsa Indonesia terus melorot. Tahun 1994, Indonesia menduduki peringkat ke-31 dari 41 negara. Tahun 1995, Indonesia turun pada urutan 33 dari 41 negara. Dan pada tahun 1996, Indonesia jatuh ke peringkat 41 dari 46 negara. Dalam situasi krisis seperti sekarang, bisa dipastikan posisi Indonesia akan terus melorot. Kondisi menjadi tanda paling serius betapa bangsa Indonesia sesungguhnya sangat tidak siap untuk memasuki era persaingan bebas nanti.

Ketidaksiapan tadi disebabkan oleh kualitas sumber daya umat (SDU) yang masih jauh dari kualitas memadai untuk beradaptasi dengan tuntutan zaman globalisasi, dengan ciri utama persaingan

dan pasar bebas. Ketidaksiapan itu akan berujung pada kegagalan dalam persaingan di atas yang akan menjatuhkan umat kepada kemiskinan intelektual (tidak mau menyiasati kemajuan saintifik dan perkembangan teknologi), kemiskinan sosial (semakin teralienasi, terpinggirkan, dan tidak kritis), kemiskinan moral (semakin hedonistic dan meninggalkan basis- basis tradisional, terutama agama), kemiskinan metodologis (selalu terlambat dalam belajar dan mengakses informasi di abad yang serba cepat), dan akhirnya kemiskinan ekonomis (serba tidak kebagian peluang). Pada tahap inilah Rasulullah mengingatkan: “Nyaris saja kemiskinan itu menyebabkan kekufuran.” Bahkan Imam Ali menyebut kemiskinan sebagai kematian terbesar.

Di sisi lain, Islam adalah agama yang amat menjunjung tinggi etos, seperti dalam rincian berikut:

1. Etos intelektual, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an *“Allah mengangkat orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu di antara kalian...”* (Q.S. 48: 11).
2. Etos sosial, sebagaimana firmanNya, *“Tabukan kamu siapakah yang mendustakan agama agama? Mereka adalah orang-orang yang melantarkan anak-anak yatim dan orang-orang yang tidak berjuang menyejahterakan anak yatim”* (Q.S. 107: 1-3).
3. Etosm oral, sebagaimana disitir Al-Qur’an: *“Sesungguhnya berbahagialah orang-orang yang menyucikan dan mengingat nama tuhanNya”* (Q.S. 87: 14- 15).
4. Etos belajar, sebagaimana temaktub dalam firman tuhan: *“APakah sama orang- orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu (tidak belajar) ...?”*. Di tempat lain, Tuhan menyatakan: *“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang yang menciptakan... (Q.S. 96: 1-2)”*.
5. Etos kerja, sebagaimana ditegaskan Allah dalam ayat-Nya: *“Bekerjalah.Segera Allah, Rasul-Nya dan seluruh umat yang beriman akan melihat hasil karyamu.”* (Q.S. 9: 105).

6. Etos transformasi dan metodologis, sebagaimana dengan amat tandas ditegaskan oleh AL-Qur'an demikian: *“Transformasikanlah mereka ke jalan Tuhanmu dengan penuh kearifan, supermotivasi positif, dan sanggahlah mereka dengan cara-cara yang lebih metodologis”* (Q.S. 16: 125).
7. Etos penghargaan (Apresiasi) terhadap suatu karya, sebagaimana dinyatakan Allah dalam kitab suci: *“Siapa yang berkarya baik, seberat zarah sekalipun, pasti akan menyaksikan balasannya”* (Q.S. 99: 7).

Melihat adanya jurang antara kenyataan yang menimpa umat Islam, di satu sisi, dengan ideal ajaran normatif Islam, di sisi lain, melahirkan sejumlah keprihatinan, yang pada gilirannya kelak melahirkan model-model pengembangan dan pemberdayaan umat Islam.

Secara etimologis, pengembangan berarti membina dan meningkatkan kualitas, dan masyarakat Islam berarti kumpulan manusia yang beragama Islam. Secara terminologis, pengembangan masyarakat Islam berarti mentransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga (usrah), kelompok sosial (jamaah), dan masyarakat (ummah).

Pengertian lain, sebagaimana dikemukakan oleh Amrullah Ahmad (1999: 9), menyebutkan bahwa pengembangan Masyarakat Islam adalah system tindakan nyata yang menawarkan alternative model pemecahan masalah ummah dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif Islam.

Dengan demikian, pengembangan masyarakat Islam merupakan model empiris pengembangan perilaku individual dan kolektif dalam dimensi amal saleh (karya terbaik), dengan titik tekan pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sasaran individual yaitu setiap individu muslim, dengan orientasi sumber daya manusia. Sasaran komunal adalah kelompok atau komunitas muslim, dengan orientasi pengembangan system masyarakat.

Sasaran institusional adalah organisasi Islam dan pranata sosial kehidupan, dengan orientasi pengembangan kualitas dan islamitas kelembagaan.

Dalam pengertian lain yang agak disederhanakan, pengembangan masyarakat– atau pengembangan sumber daya manusia–diartikan sebagai memperluas horizon pilihan bagi masyarakat banyak. Hal ini beraeri bahwa masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan.

Dengan paparan sederhana tadi, menjadi jelaslah bahwa proses pengembangan dan pemberdayaan akan menyediakan sebuah ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan. Sebab, manusia atau masyarakat yang dapat memajukan pilihan-pilihan dan yang dapat memilih dengan jelas adalah masyarakat yang punya kualitas.

Kegiatan pengembangan masyarakat Islam terdiri dari dari kegiatan pokok berupa transformasi dan pelebagaan ajaran Islam ke dalam realitas Islam, yang rinciannya sebagai berikut:

1. Penyampaian konsep Islam mengenai kehidupan sosial, ekonomi, dan pemeliharaan lingkungan.
2. Penggalangan Ukhuwah Islamiyah lembaga umat dan kemasyarakatan pada umumnya dalam rangka mengembangkan komunitas dan kelembagaan Islam.
3. Menjalin dan mewujudkan berbagai MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan berbagai kekuatan masyarakat.
4. Riset potensi local dakwah, pengembangan potensi local, dan pengembangan kelompok swadaya masyarakat.
5. Katalisasi aspirasi dan kebutuhan umat.
6. Konsultasi dan dampingan teknis kelembagaan.

7. Mendampingi penyusunan rencana dan aksi sosial pelaksanaan rencana dalam rangka pengembangan komunitas dan institusi Islam.
8. Memandu pemecahan masalah sosial, ekonomi dan lingkungan umat.

Melaksanakan stabilisasi kelembagaan dan menyiapkan masyarakat untuk membangun secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam era global yang kemudian menciptakan masyarakat terbuka, terjadi perubahan-perubahan yang sangat besar dan mendasar alam –setidaknya –tiga wacana kehidupan: wacana ekonomi, politik, dan budaya.

Dalam matra ekonomi, dapat dilihat adanya perdagangan bebas dan kerja sama regional dan internasional. Perubahan struktur ekonomi tersebut tentu akan mengubah tata kehidupan dan tata ekonomi suatu masyarakat. Dalam matra politik, proses globalisasi merupakan suatu proses demokratisasi. Adapun dalam arena budaya, telah terjadi gelombang besar dengan apa yang dinamakan sebagai budaya global.

Untuk memasuki medan seperti tadi, jelas diperlukan manusia unggul yang mempunyai kualifikasi untuk bersaing dengan sumber daya dari luar. Jika syarat ini tidak dipenuhi, masyarakat Islam akan terjatuh pada apa yang dinamakan Drucker sebagai proletariat-proletariat yang hidup di zaman modern. Istilah proletariat, oleh Begawan manajemen modern, Peter F Ducker, dipasangkan dengan term kognitariat. Istilah pertama merujuk kepada pengertian pekerja-pekerja yang cenderung mengandalkan otot dengan sedikit kemampuan otak, sedangkan istilah yang disebut terakhir merujuk kepada tenaga-tenaga terampil yang cenderung lebih banyak menggunakan kemampuan kognisinya, dan setiap saat selalu meng-upgrade keterampilan dan pengetahuannya.

Dalam mencegah terjerumusny umat Islam—khususnya yang ada di Indonesia— menjadi proletariat-proletariat baru, diperlukan adanya upaya-upaya pengembangan dan peningkatan kualitas diri yang tanpa henti. Untuk itu, hal pertama yang harus ditanamkan adalah komitmen untuk memperbaiki diri secara terus menerus (*committed to continous improvement*).

B. Tahap-Tahap Pengembangan Masyarakat Islam

Kalau merujuk kepada apa yang dicontohkan Rasulullah ketika membangun masyarakat, setidaknya harus ditempuh tiga tahap atau proses pengembangan masyarakat, yakni takwin, tanzim, dan taudi'. Takwin adalah tahap pembentukan pembentukan masyarakat Islam. Kegiatan pokok tahap ini adalah dakwah Islam bil lisan sebagai ikhtiar sosialisasi akidah, ukhuwah, dan ta'awun. Semua aspek tadi, ditata menjadi instrument sosiologis. Proses sosialisasi dimulai dari unit terkecil dan terdekat sampai kepada perwujudan-perwujudan kesepakatan.

Sasaran tahap pertama ini adalah terjadinya internalisasi Islam dalam kepribadian masyarakat, kemudian mengekspresikannya dalam ghirah dan sikap membela keimanan dari tekanan structural A-mala Al-Mutrafin (para penindas). Pada tahap ini, Rasulullah hakikatnya sedang melaksanakan dakwah untuk pembebasan akidah masyarakat dari system akidah yang menjadikan keinginan subjektif manusia (Al-hawa) yang dipersonifikasikan dalam bentuk berhala (asnam, mungkin sekarang bentuknya adalah gemerlapnya barang-barang di etalase-etalase toko) menuju system akidah alamiah (asli) yang hanya mengikatkan diri dengan mengesakan Allah secara murni.

Menurut Amrullah Ahmad (1996: 66), system teologis Arab jahiliah adalah menggunakan system berpikir bertingkat: mereka mempercayai adanya Allah tetapi untuk mendekati dan menujunya, membuat sarana berupa berhala. Implikasi epistemology syirik dalam cara berpikir adalah dikotomik, memandang segala sesuatu

dengan dua pijakan visi; Allah dan berhala. Implikasi sosiologis dan cultural dari, system akidah yang mendia ini telah melahirkan sebuah tata sosial dan budaya tiranik (tugyah), melegitimasi perbudakan, pemasangan hak-hak esensial manusia, dan ketimpangan stratifikasi sosial dan ekonomi.

Sistem yang rapuh secara epistemologis ini sudah berurat berakar dalam bangunan dasar masyarakat Mekah. Kenyataan mengabarkan bahwa system nilai yang salah dan zalim yang dikelola secara rapi akan dapat bertahan dari tekanan dakwah, kecuali ada kekuatan dakwah yang terorganisir dengan kerangka tauhid yang tuntas dan ditopang oleh kepemimpinan yang kuat. Selama masa pembentukan ini dalam kurun 13 tahun, dakwah Islam belum berhasil mengubah system keberhalahan. Hanya saja kekuatan para penindas (AL-Mala Al-Mutrafin) sudah mulai terurai dan longgar.

Menurut Amrullah Ahmad (1996: 67), pada tahap takwin, fundamen sosial Islam dalam bentuk akidah, Ukhuwah Islamiyah, Ta'awun, dan salat sudah dapat diletakkan oleh Nabi. Demikian juga tauhid telah menjadi instrument sosiologis dalam mempersatukan para sahabat dan masyarakat Muslimin dengan ghirah Islam yang sangat mendalam. Proses dakwah terus berlangsung meskipun dengan tekanan structural yang semakin keras. Sasaran dakwah mulai bergeser kepada kabilah yang datang pada musim haji. Sasaran baru pada gilirannya akan mengungkap banyak perspektif strategi dan metodologi dakwah yang relevan yang dihadapi oleh masyarakat Islam ketika itu, bahkan dapat ditransformasikan sebagai salah satu model masyarakat kini dan masyarakat yang akan datang.

Akibat susulan dari dakwah terhadap kabilah menghasilkan Bai'at Aqaba I dan Bai'at Aqabah II. Inilah yang disebut banyak sejarawan sebagai jembatan yang akan membuka perspektif dan strategi baru dakwah Nabi SAW. Dalam kerangka community development, Bai'at Aqabah adalah semacam Memorandum of

Understanding yang akan ditindaklanjuti dengan Memorandum of Agreement (kesepakatan bersama untuk melaksanakan program bersama). Baitul Aqabah adalah kristalisasi interaksi da'i dengan mad'u yang paling fundamental yang melahirkan struktur hubungan sosial Islam.

Dengan demikian, pada tahap takwin' telah terwujud jamaah Islam swadaya yang akan menjadi community base kegiatan dakwah Nabi di Yastrib. Tanpa terwujudnya Bai'at Aqabah, secara sosiologis, dakwah Nabi di Yastrib tidak akan berjalan semulus yang terjadi. Karena itu, kesepakatan (Bai'at) antara da'i dan mad'u merupakan sunnatullah dalam sejarah yang menentukan keberhasilan dakwah Islam. Karena bai'at merupakan prinsip perorganisasian Islam, maka adanya organisasi dakwah merupakan sunnatullah untuk keberhasilan dakwah.

Tahap berikutnya adalah tanzim, yakni tahap pembinaan dan penataan masyarakat. Pada fase ini internalisasi dan eksternalisasi Islam muncul dalam bentuk institusional Islam secara komprehensif dalam realitas sosial. Dimulai dengan pemahama karakteristik sosial masyarakat Madinah, baik melalui informasi dari Mus'ab bin Umair maupun interaksi Nabi dengan jamaah haji peserta Bai'at Aqabah. Dalam perspektif strategi dakwah, hijrah dilakukan ketika tekanan cultural, structural, dan militer sudah demikian mencekam sehingga jika tidak hijrah, bisa terjadi involusi kelembagaan dan menjadi lumpuh.

Nabi mulai gerakan penataan dakwah (tandhim) dengan hijrah. Hijrah, yang dapat diberi pengertian pemutusan keterikatan masyarakat dengan tanahnya, bisa mengubah pandangan manusia terhadap alam, dan mengubahnya menjadi pandangan yang luas dan menyeluruh yang dapat menghilangkan kejumudan, kemerosotan sosial, pemikiran, dan perasaan sehingga masyarakat yang jumud menjadi dinamis. Dalam proses hijrah, masyarakat diajak memutus hubungan dari lingkungan dan tata nilai yang zalim sebagai upaya

pembebasan manusia untuk menemukan jati diri yang fitri yang telah terendam lingkungan sosio-kultur yang tidak islami. Setelah sampai di Madinah, Nabi melakukan beberapa langkah mendasar yaitu (1) membangun Masjid Quba dan masjid Nabawi di Madinah; (2) membentuk lembaga Ukhuwah Islamiyah antara Muhajirin dan Anshar; (3) membuat “Piagam Madinah” yang disepakati pelbagai suku dan kaum Yahudi.

Dalam pandangan Amrullah Ahmad, tiga peristiwa dakwah yang strategis itu memberikan kerangka kerja dakwah Islami. Pertama, berpijak dari masjid dakwah Islam Nabi menata dan mengembangkan masyarakat Islam. Kedua, untuk memperkuat basis komunitas Muslim awal, dakwah Islam sangat memerlukan organisasi atau lembaga yang merepresentasikan ukhuwah Islamiyah (integritas jamaah muslim) baru di Madinah. Hal ini dapat dipandang sebagai penataan kelembagaan yang akan dijadikan alat untuk mempertahankan, membina, dan mengembangkan masyarakat Islam Madinah. Ketiga, berpijak da’i kekuatan yang ada dalam organisasi dakwah itu, Nabi menciptakan landasan kehidupan politik Madinah dengan menandatangani perjanjian dengan semua kekuatan sosial dan politik yang ada. Dalam perspektif pengembangan masyarakat, tindakan Nabi dapat disebut sebagai menciptakan Memorandum of agreement antara da’i dan mad’u sebagai landasan kerja membangun dan mengembangkan masyarakat Madinah. Bila kedua tahap tadi sudah selesai dijalankan, masuklah pada tahap ketiga, yaitu taudi’.

Yang dimaksud dengan taudi’ adalah tahap keterlepasan dan kemandirian. Pada tahap ini, umat telah siap menjadi masyarakat mandiri, terutama tsecara manajerial. Bila ketiga tahap ini selesai dilalui, bolehlah berharap akan munculnya suatu masyarakat Islam yang memiliki kualitas yang siap dipertandingkan dengan kelompok-kelompok masyarakat lain dalam arena pasar bebas nanti.

Pada fase masyarakat mandiri—atau banyak disebut orang dengan istilah masyarakat madani—problem agama seharusnya tidak lagi berkuat pada ‘pemujaan Tuhan’. Pada fase ini, menurut hemat Abdul Munir Mul Khan (Humanisasi Agama dan Dakwah, 1999: 1), problem agama adalah pembebasan manusia dan dunia dari kemiskinan, konflik etnis, dan keagamaan juga penindasan atas nama Negara, ideology, politik, bahkan agama.

Oleh karena itu, menurut Abdul Munir Mul Khan (1999: 1), agama harus dipahami sebagai wacana kebudayaan. Karena, bagaimanapun, wahyu Tuhan akan berubah menjadi masalah kebudayaan begitu disentuh oleh manusia. Praktek keagamaan dan dakwah yang amat berlebihan dalam ‘mengurus Tuhan’ akan membuat agama dan dakwah cenderung tidak manusiawi dan tidak peduli terhadap berbagai persoalan konkret yang dihadapi manusia.

Dengan paparan diatas, segera bisa dikatakan bahwa upaya dakwah bukan semata-mata proses mengenalkan manusia kepada Tuhannya. Melainkan bahkan merupakan sebuah proses transformasi sosial. Gera modernitas zaman yang demikian cepat telah pula menyeret apa yang dinamakan oleh sosiolog Lyman sebagai the seven deadly sins alias tujuh dosa maut (Jalaluddin Rakhmat, 1997: 225) yakni: (1) Ketidakpedulian; (2) Nafsu; (3) Angkara Murka; (4) Kesombongan; (5) Iri hati; (6) Lahap; (7) Kerakusan.

Tujuh hal ini adalah bagian dari problem yang dihadapi masyarakat yang tengah bergerak menuju kearah modern. Ini pula yang harus diwaspadai oleh para da’i dan siapa saja yang concern terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Ketujuh persoalan tadi berkisar pada masalah-masalah yang bersifat cultural-psikologis yang memerlukan penanganan secara sangat serius. Itu berarti agama harus diturunkan sebagai wacana budaya yang diyakini bisa menjawab berbagai tantangan budaya kontemporer tadi.

Tanpa kesediaan menjadikan agama sebagai wacana budaya, menurut Abdul Munir Mul Khan (1999: 3), gerakan dakwah, ataupun gerakan pengembangan masyarakat akan mengalami kesulitan untuk secara sungguh-sungguh peduli terhadap penderitaan dan kemiskinan. Dengan strategi pengembangan agama sebagai wacana budaya dan seni, dakwah Islam dan gerakan pengembangan masyarakat mungkin bisa menempatkan diri sebagai pemeran strategis bagi sebuah Indonesia baru yang lebih baik.

Disamping itu, menurut Abdul Munir Mul Khan (Teologi Kebudayaan, 1995: 26), konsep dan strategi dakwah harus diarahkan pada pemecahan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan. Dakwah pemecahan masalah diharapkan akan menghasilkan tiga kondisi berikut:

1. Tumbuhnya kepercayaan dan kemandirian umat serta masyarakat sehingga berkembang sikap optimis.
2. Tumbuhnya kepercayaan terhadap kegiatan dakwah guna mencapai tujuan kehidupan yang lebih ideal.
3. Berkembangnya suatu kondisi sosio-ekonomi-budaya-politik-iptek sebagai landasan peningkatan kualitas hidup, atau peningkatan kualitas sumber daya umat (SDU).

Dengan demikian, dalam hemat Abdul Munir Mul Khan (1995: 27), dakwah pemecahan masalah merupakan upaya yang demokratis bagi pengembangan dan peningkatan kualitas hidup sebagai bagian pemberdayaan manusia dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan objektif. Melalui dakwah pemecahan masalah dan pengembangan masyarakat seperti itu, sesuatu komunitas masyarakat Muslim terkecil sekalipun dapat dikembangkan menjadi komunitas sosial yang mempunyai kemampuan internal yang berkembang mandiri dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya.

Dengan demikian, pengembangan kemampuan dan kualitas sumber daya umat (SDU) dalam lingkup kecil, seperti keluarga atau jamaah pengajian, harus menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian seluruh lembaga formal dakwah Islam dan siapapun – secara terencana dan sistematis.

C. Filsafat dan Ideologi Pengembangan Masyarakat Islam

Setiap ideologi dan agama apapun niscaya memiliki pandangan dunia (*weltanschauung, worldviev*). Dalam hal ini, paling tidak, ada dua pengertian ideology: pengertian khusus dan umum. Dalam pengertian umum, ideology didefinisikan sebagai system pemikiran dan keyakinan, sedangkan dalam pengertian yang lebih khusus, didefinisikan sebagai system pemikiran yang membatasi bentuk perilaku manusia. Dalam pengertian yang disebut diakhir, ideology memiliki kesamaan makna dengan apa yang dinamakan sebagai pandangan dunia.

Secara sangat sederhana, bisa dikatakan bahwa tanpa ideology dan pandangan dunia, kehidupan manusia niscaya akan sia-sia. Ideology dan pandangan dunia inilah yang membedakan makhluk manusia dengan binatang.

Agar hidup bisa menjadi lebih bermakna, manusia mesti memiliki tujuan hidup yang jelas dan teruji. Islam adalah agama yang memiliki seperangkat keyakinan hidup.

Manusia Islam, dengan demikian, adalah manusia yang memiliki tujuan hidup yang sesuai dengan tujuan hidup yang digariskan Islam. Pada gilirannya, tujuan hidup melahirkan adanya konsep kewajiban dan larangan, kemuliaan dan kerendahan, kesucian dan kekotoran, prinsipalitas dan aksidentalitas. Apakah hakikat pekerjaan kita? Untuk apa kita melakukan pekerjaan? Apakah sah kita melakukan suatu pekerjaan?

Pertanyaan-pertanyaan model inilah yang mesti dijawab tuntas oleh ideology dan pandangan dunia. Demi ideology dan pandangan

dunia itu pula, sebagai basis kesadaran antropologis, Islam menegaskan tiga kesadaran: kesadaran ontologism, kesadaran historis, dan kesadaran aksiologis. Menurut sebuah riwayat, tiga kesadaran inilah yang dianggap akan mengundang rahmat tuhan. Riwayat itu menyatakan: *rahimallahu imraan arafa nafsahu wa arafa min aina wa fi aina wa ila aina*.

Sebagai agama yang menekankan kepedulian sosial, Islam menegaskan bahwa misi dari setiap ritus Islam adalah akuntabilitas sosial; tanpa implikasi sosial, semua ritual yang dilakukan dipandang sebagai kesia-siaan belaka. Fazlur Rahman (1983: 57) menegaskan, tanpa keinginan dan aksi untuk menyejahterakan dan memberdayakan orang-orang yang miskin dan hidup dalam kepapaan, salat sekalipun akan berubah menjadi semacam perbuatan yang munafik. Bahkan, Fazlur Rahman (1983: 57) sampai pada kesimpulan bahwa sikap tidak peduli terhadap orang-orang yang memerlukan bantuan dan upaya pemberdayaan ini mencerminkan puncak kepicikan dan kesempitan akal, sekaligus kelemahan paling mendasar yang bersemayam dalam diri manusia.

Implikasi sosial inilah yang menjadi sumber kesadaran akan pentingnya sikap peduli terhadap lingkungan sosial. Sikap peduli terhadap lingkungan sosial inilah yang kemudian melahirkan gerakan pemberdayaan masyarakat.

Persoalannya, mengapa harus pemberdayaan? Agama, apapun namanya, mengajarkan kasih sayang; menyuruh mengembangkan dan memberdayakan siapa saja yang papa. Kemanusiaan, apapun basis filosofinya, menegaskan bahwa manusia adalah makhluk mulia. Ketidakberdayaan yang melekat pada setiap sosok manusia, apapun suku, bangsa, dan rasnya, menuntut sentuhan-sentuhan kemanusiaan dan pemberdayaan-pemberdayaan insaniah. Islam adalah agama kemanusiaan. Siapa yang membunuh satu jiwa, ia seumpama membunuh seluruh manusia itu sendiri. Inilah makna kesatuan kemanusiaan Islam (Q.S.5: 32).

Menurut Al-Qur'an, pendusta agama adalah mereka yang tidak mengembangkan dan memberdayakan. Masih menurut Al-Qur'an, misi risalah Islam adalah pemberdayaan; mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar, menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk, mengatasi himpitan-himpitan hidup dan melepaskan belenggu-belenggu yang bisa memberangus orang-orang.

Untuk mewujudkan itu semua, diperlukan manusia-manusia yang tercerahkan (*muthahhar*) yang siap mendarmabaktikan seluruh hidupnya untuk perbaikan umat. Manusia yang tercerahkan didefinisikan oleh Ali Syari'ati (1993: 28) sebagai orang-orang yang sadar akan keadaan kemanusiaan (*human condition*) di masanya, setting kesejahteraannya, dan kemasyarakatannya. Kesadaran semacam itu, menurut Syari'ati, akan dengan sendirinya member tanggungjawab sosial.

Alhasil, yang disebut orang-orang yang tercerahkan adalah mereka yang peduli terhadap kondisi sosial yang ada di sekelilingnya; mereka yang siap untuk berjuang mengembangkan dan memberdayakan masyarakatnya. Karena itu, Syari'ati menyebut orang-orang yang peduli terhadap lingkungan sosialnya ini sebagai 'nabi- nabi sosial' –atau yang diistilahkan dalam bahasa Parsi dengan *rushan fekr*.

Dalam pandangan Al Syari'ati (1993: 52-53), seorang Muslim yang tercerahkan niscaya akan mampu melakukan hal-hal berikut:

1. Menyaring dan menyuling sumber-sumber daya masyarakat dan mengubah berbagai penyebab kebobrokan dan kemandekan menjadi kekuatan yang dinamis dan progresif.
2. Mengubah konflik antarkelas dan sosial yang ada menjadi suatu kesadaran dan tanggungjawab sosial (*akuntanilitas sosial*), yakni dengan cara pemanfaatan berbagai kekuatan atau *energy* yang ada sehingga menjadi sinergis.

3. Menjembatani kesenjangan yang semakin lebar antara “pulau yang dihuni orang-orang yang tercerahkan” dan “pantai rakyat kebanyakan” melalui upaya menjalin hubungan kekeluargaan dan pemahaman di antara mereka. Dengan demikian, agama diposisikan sebagai sumber yang membangkitkan dan melahirkan gerakan untuk kepentingan masyarakat.
4. Mencegah agar senjata agama tidak jatuh kepada mereka yang tidak patut memilikinya yaitu mereka yang memanfaatkan agama untuk tujuan-tujuan pribadi. Dengan cara itu, akan diraih energi yang diperlukan untuk menggerakkan rakyat.
5. Mengupayakan suatu kebangkitan kembali agama, sekaligus menyelamatkan masyarakat dari unsure-unsur yang bisa membius mereka.
6. Menghilangkan semangat peniruan (taklid) dan kepatuhan, yang merupakan ciri agama biasa, kemudian menggantinya dengan semangat pemikiran bebas (ijtihad) yang kritis dan progresif.

Orang-orang yang tercerahkan seperti itulah yang kana menjadi lokomotif dari berbagai upaya memberdayakan dan memperkuat posisi masyarakat yang tengah ditimpa berbagai lara tanpa derita. Merekalah nabi-nabi sosial yang kehadirannya diharapkan membawa perubahan yang segar bagi masyarakat yang tengah dilanda kebodohan, kemelaratan, kejahatan, ketakhayulan, dan kebobrokan.

D. Kompleks Pengembangan Masyarakat Islam

Pada dasarnya Islam adalah agama pemberdayaan. 1 Dalam pandangan Islam, pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan. Dalam konteks Indonesia, masyarakat Islam—sebagai penghuni mayoritas bangsa—masih terlalu jauh dari

segala keunggulan bila dibandingkan dengan sesama umat manusia dari Negara-negara lain. Fakta ini menuntut adanya upaya-upaya pemberdayaan yang sistematis dan terus-menerus untuk melahirkan masyarakat Islam yang berkualitas.

Istilah “pemberdayaan” adalah terjemahan dari istilah asing empowerment. Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan—atau setidaknya diserupakan—dengan istilah pengembangan. Bahkan dua istilah ini, dalam batas-batas tertentu bersifat interchangeable atau dapat dipertukarkan.

Dalam pengertian lain, pemberdayaan atau pengembangan—atau tepatnya pengembangan sumber daya manusia—adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan.

Dengan paparan sederhana di atas, jelaslah bahwa proses pengembangan dan pemberdayaan pada akhirnya akan menyediakan sebuah ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan. Sebab, manusia atau masyarakat yang dapat memajukan pilihan-pilihan dan dapat memilih dengan jelas adalah masyarakat yang punya kualitas.

Pertanyaannya, siapakah yang harus diberdayakan? Dalam konteks ini, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, pihak yang harus diberdayakan adalah masyarakat Islam sendiri, sebagai penghuni mayoritas dari bangsa Indonesia. Istilah “masyarakat Islam”, secara sederhana, berarti kumpulan manusia yang beragama Islam. Jadi, secara terminologis, pengembangan atau pemberdayaan masyarakat Islam berarti mentransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga (usrah), kelompok sosial (jama’ah), dan masyarakat (ummah).

Amrullah Ahmad menyatakan bahwa pengembangan masyarakat Islam adalah system tindakan nyata yang menawarkan alternative model pemecahan masalah ummah dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif Islam. Imang Mansur Burkan mendefinisikan pemberdayaan umat atau masyarakat sebagai upaya membangkitkan potensi umat Islam ke arah yang lebih baik, baik dalam kehidupan sosial, politik maupun ekonomi.

Dengan demikian, pengembangan atau pemberdayaan masyarakat Islam merupakan model empiris pengembangan perilaku individual dan kolektif dalam dimensi amal saleh (Karya terbaik), dengan titik tekan pada pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat. Sasaran individual yaitu setiap individu Muslim, dengan orientasi sumber daya manusia. Sasaran komunal adalah kelompok komunitas Muslim, dengan orientasi pengembangan system masyarakat. Dan sasaran istitusional adalah organisasi Islam dan pranata sosial kehidupan, dengan orientasi pengembangan kualitas dan islamitas kelembagaan.

Dalam era global yang kemudian menciptakan masyarakat terbuka, terjadi perubahan-perubahan yang sangat besar dan mendasar, setidaknya dalam— setidaknya—tiga wacana kehidupan: wacana ekonomi, politik, dan budaya.

Dalam matra ekonomi, dapat dilihat adanya perdagangan bebas dan kerja sama regional dan internasional. Perubahan struktur ekonomi ini tentu akan mengubah tata kehidupan dan tata ekonomi suatu masyarakat. Dalam matra politik, proses globalisasi merupakan suatu proses demokratisasi. Adapun dalam arena budaya, telah terjadi gelombang besar dengan apa yang dinamakan sebagai budaya global. Untuk memasuki medan seperti tadi, jelas diperlukan manusia-manusia unggul yang mempunyai kualifikasi untuk bersaing dengan sumber daya dari luar.

Jika tidak, maka, masyarakat Islam akan terjatuh pada apa yang dinamakan Alvin Toffler sebagai proletariat-proletariat yang hidup

di zaman modern. Dalam mencegah terjerumusnya umat Islam—khususnya yang ada di Indonesia—menjadi proletariat-proletariat baru, niscaya diperlukan adanya upaya-upaya pengembangan dan peningkatan kualitas diri yang tanpa henti. Hal pertama yang harus ditanamkan adalah komitmen untuk memperbaiki diri secara terus menerus (*committed to continuous improvement*).

Menurut Agus Efendi (1999: 4-5), setidaknya ada tiga kompleks pemberdayaan yang mendesak untuk diperjuangkan dalam konteks keumatan masa kini, yakni pemberdayaan dalam tataran ruhaniyah, intelektual, dan ekonomi.⁸

Pertama, pemberdayaan pada matra ruhaniyah. Dalam pandangan Agus Efendi, degradasi moral atau pergeseran nilai masyarakat Islam saat ini sangat mengguncang kesadaran Islam. Kepribadian kaum Muslim—terutama mayoritas generasi mudanya—begitu telanjang tekooptasi oleh budaya negatif barat yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Islam. Hal ini juga diperparah dengan aggalnya pendidikan agama adi hampir semua lini pendidikan.

Untuk keluar dari belitan persoalan ini, masyarakat Islam harus berjuang keras untuk melahirkan desain besar kurikulum pendidikan untuk setiap wilayah pendidikan, yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan total ruhaniyah islamiyah, yang tidak bertentangan dengan perjuangan kebenaran ilmiah dan kemodernan.

Kedua, pemberdayaan intelektual. Dengan sangat telanjang dapat disaksikan betapa umat Islam yang ada di Indonesia—bahkan di manapun—sudah terlalu jauh tertinggal dalam kemajuan dan penguasaan teknologi. Untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual sebagai sebuah perjuangan besar (jihad). Untuk itu, dalam konteks jurisprudensi tanggung jawab sosial Islam, menurut Agus Efendi, masyarakat Islam harus berani mengedepankan jargon teologi sosial, di bawah ini:

kajian ini, masalah kemiskinan menjadi demikian identik dengan masyarakat Islam di Indonesia. Pemecahannya, adalah tanggungjawab masyarakat Islam sendiri, yang selama ini selalu terpinggirkan. Dalam konteks ekonomis, seorang putra Islam dan generasi Qur’ani awal terbaik, Sayyidina Ali mengatakan, “Sekiranya kefakiran itu berwujud seorang manusia, sungguh aku akan membunuhnya”.

Situasi ekonomi masyarakat Islam Indonesia bukan untuk diratapi, melainkan untuk dicarikan jalan pemecahannya. Untuk keluar dari himpitan ekonomis ini, diperlukan perjuangan besar dan gigih dari setiap komponen umat. Setiap pribadi muslim ditantang untuk lebih keras dalam bekerja, berkreasi, dan berwirausaha (entrepreneurship); lebih win-win dalam bekerja sama, komunikatif dalam berinteraksi; lebih skillful dalam memfasilitasi jaringan kerja, dan lebih professional dalam mengelola potensi-potensi dan kekuatan-kekuatan riil ekonomi umat. Untuk bisa keluar dari himpitan situasi ekonomi seperti sekarang, di samping penguasaan terhadap life skill tau keahlian hidup, keterampilan berwirausaha, dibutuhkan juga pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang selama ini tidak pernah ‘dilirik’.

E. Memperkuat Basis Kewirausahaan Masyarakat Islam

Salah satu upaya untuk memberdayakan potensi ekonomi umat serta membangun sebuah masyarakat yang mandiri adalah melahirkan sebanyak-banyaknya wirausahawan baru. Asumsinya sederhanya, kewirausahaan pada dasarnya adalah kemandirian, terutama kemandirian ekonomis; dan kemandirian adalah kebudayaan.

Semangat Islam akan kemandirian banyak dijumpai dalam berbagai aya Al- Qur’an maupun Hadits Nabi. Salah satu contohnya dapat dijumpai dalam ayat: “Apakah engkau tahu siapakah para pendusta agama? Mereka adalah yang menelantarkan anak yatim dan tidak peduli terhadap para fakir miskin.”

Maafum mukhalafah dari ayat di atas adalah “orang kaya yang tidak menyantuni yatim dan fakir miskin ekuivalen dengan orang miskin yang tidak berjuang terus-menerus untuk meraih kemandirian ekonomis”. Kewajiban kaum mempunya untuk membayar zakat, anjuran untuk bersedah, wakaf, dan kewajiban untuk memberdayakan orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomis merupakan petunjuk Islam paling jelas terhadap etos kewirausahaan (entrepreneurship).

Istilah wirausaha atau wiraswasta adlah padanan kata dari istilah asing entrepreneurship. Pelakunya disebut wirausahawan, wiraswastawan; biasa juga disebut sama dengan kata bendanya yaitu wirausaha atau wiraswasta, yang dalam istilah asingnya dikenal sebagai sebutan entrepreneur. Kajian ini akan lebih banyak menggunakan istilah wirausaha (dengan berbagai derivatnya) daripada wirausaha, secara teknis kedua istilah tersebut tidak dibedakan.

Entrepreneur adalah sebuah istilah yang maknanya kurang lebih sama dengan organizer. International Encyclopedia of Sosial Science mendefinisikan entrepreneur atau wirausaha sebagai anyone who bought and sold at uncertain price.

Wasty Soemanto menjelaskan pengertian wirausaha atau wiraswasta dari perspektif bahasa. Menurutnya, wiraswasta adalah sebuah istilah yang dibangun dari kata “wira” dan “swasta”. Wira berarti berani, perkasa, atau utama, sedangkan swasta berarti berdiri diatas kekuatan sendiri. Dengan melihat arti etimologis radi, pengertian wiraswasta sama sekali bukan berarti usaha partikelir, usaha sampingan, atau keterampilan berusaha sendiri.

Menurut Wasty Soemanto, lebih luas dari pengertian tadi, wiraswasta berarti keberanian, keutamaan, dan keperkasaan dalam memenuhi kebutuhan serta memecahkan permasalahan hidup dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Dengan demikian, sebagaimana dikatakan oleh Peter F Drucker, kewiraswastaan

menyangkut semua aspek kehidupan manusia, tidak hanya terbatas pada kehidupan ekonomi.

Secara luas, istilah kewirausahaan atau kewiraswastaan merujuk kepada pengertian proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan, memikul risiko financial, psikologi, dan sosial yang menyertainya serta menerima balas jasa moneter dan kepuasan pribadi.

Menurut para ahli ekonomi, wirausahawan atau wiraswaswan adalah orang yang mengubah nilai sumber daya, tenaga kerja, bahan, dan factor produksi lainnya menjadi besar daripada sebelumnya dan juga orang yang melakukan perubahan, inovasi dan cara-cara baru. Di dalam dunia modern, wirausahawan adalah orang.

F. Mengembangkan Perekonomian Berbasis Kerakyatan

Kini, masyarakat Indonesia dilanda musibah berupa krisis ekonomi yang berkepanjangan, ekonomi rakyat Indonesia—yang notabene mayoritas umat Islam— kian porak poranda. Tentu saja kondisi demikian menuntut adanya jalan keluar, berupa sikap hidup yang super-hemat dan produktif, pemanfaatan uang yang ada secara maksimal-investatif, pilihan strategis-futuristik, lingkungan yang edukatif- metodologis, manajemen yang professional dan win-win, pergaulan pendidikan yang tercerahkan, pergaulan sosial yang emansipatif-transformatif, dan terutama, silaturahmi yang inspiratif-produktif.

Semua itu, di samping menuntut penguasaan terhadap life skill atau keahlian hidup, juga pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yang selama ini tidak pernah ‘dilirik’.

Premisnya sederhana, selama ini rakyat terlampau dizalimi dan disishkan, system ekonomi yang dikembangkan adalah system ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir orang, dengan menelantarkan ratusan juta orang lainnya.

Salah satu persoalan serius yang dihadapi bangsa ini adalah tingkat kesenjangan ekonomi yang terlampau lebar, serta tingkat kemiskinan yang terlampau menakutkan. Krisis ekonomi yang berkepanjangan saat ini telah dengan sukses mengantar bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa termiskin di dunia. Untuk itu, upaya-upaya pengembangan dan pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi hal yang mendesak dan tidak bisa ditunda-tunda lagi.

Menurut Goenawan Sumodiningrat (1998), kalau dilihat dari segi penyebabnya, kesenjangan dan kemiskinan dapat dibedakan menjadi kesenjangan dan kemiskinan natural, kesenjangan dan kemiskinan cultural, serta kesenjangan dan kemiskinan struktural.

Kesenjangan dan kemiskinan natural adalah kesenjangan dan kemiskinan yang disebabkan oleh factor-factor alamiah, seperti perbedaan usia, perbedaan kesehatan, perbedaan geografis tempat tinggal, dan sebagainya. Kesenjangan dan kemiskinan cultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh perbedaan adat istiadat, perbedaan etika kerja, dan sebagainya. Adapun kesenjangan dan kemiskinan structural adalah kesenjangan dan kemiskinan yang disebabkan oleh factor-factor biatan manusia, seperti distribusi asset ekonomi yang timpang, kebijakan ekonomi yang diskriminatif, koruptis, dan korutif, serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung tidak menguntungkan kelompok masyarakat atau golongan tertentu.

Berangkat dari ketiga macam jenis kesenjangan dan kemiskinan tadi, di satu pihak harus diakui bahwa di tengah-tengah masyarakat kita masih ada factor-factor natural dan cultural yang membuat masyarakat kita agak sukar untuk beranjak dari lembah kemiskinan yang selama ini akrab dengan mereka. Di sisi lain, penyebab terbesar yang membuat mereka terus-menerus berkubang dalam jurang kemiskinan adalah justru factor structural, yang diindikasikan oleh lemahnya tingkat pengawasan yang mengakibatkan korupsi dan kolusi demikian merajarela.

Dengan demikian, upaya pengembangan dan pemberdayaan perekonomian rakyat, perlu diarahkan untuk mendorong terjadinya perubahan structural. Hal itu bisa dilakukan dengan cara memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam konstelasi perekonomian nasional.

Perubahan structural ini bisa meliputi proses perubahan dari pola ekonomi tradisional ke arah ekonomi moder, dari ekonomi lemah ke ekonomi tangguh, dari ekonomi substansi ke ekonomi pasar, dari ketergantungan kepada kemandirian, dari konglomerat ke rakyat.

Perubahan struktural seperti ini tentu mensyaratkan langkah-langkah dasar yang meliputi pengawasan sumber daya, penguatan kelembagaan, penguasaan kelembagaan, serta pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Berkaitan dengan langkah-langkah di atas maka pilihan kebijakan hendaklah dilaksanakan dalam beberapa langkah strategis berikut:

2. Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada asset produksi. Di antara asset produksi yang paling mendasar adalah akses kepada sumber dana. Tersedianya dana yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi yang kecil, sehingga dapat digunakan untuk pemupukan modal secara berkesinambungan.
3. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat. Sebagai produsen dan penjual, posisi dan kekuatan rakyat dalam perekonomian sangat lemah. Selain itu, upaya yang tidak kalah pentingnya adalah memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi ini dengan pendekatan kebersamaan. Dengan membangun kebersamaan dan kesetiakawanan, akan timbul rasa percaya

- diri dan harga diri dalam menghadapi era keterbukaan ekonomi.
4. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang kuat dan tangguh. Upaya-upaya perbaikan kesehatan dan pelayanan pendidikan harus dilakukan tanpa henti dengan memperhatikan kualitas yang semakin baik. Hal itu bisa dilakukan melalui berbagai upaya, misalnya pendidikan formal biasa, pelatihan-pelatihan, eksperimen di lapangan, dan sebagainya.
 5. Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong munculnya tenaga kerja yang terampil, menguasai keterampilan dan keahlian hidup, serta tenaga kerja mandiri dengan keabekal keahlian wirausaha.
 6. Pemerataan pembangunan antardaerah. Untuk itu, pemerintah harus secara proaktif memberikan sejumlah kemudahan, seperti bantuan kredit lunak untuk pengusaha kecil, mengadakan penyuluhan dan pelatihan. Dengan demikian, inti oembangunan ekonomi kerakyatan tidak lain adalah mensejahterakan masyarakat dalam dimensi lahir dan batin.

Upaya-upaya untuk memperkuat posisi rakyat atas Negara, tidak saja membutuhkan peran pemerintah –dalam hal ini adanya political will dari mereka – tetapi juga peran aktif dari masyarakat sendiri.

sesungguhnya hal ini sudah dimulai semenjak dasawarsa awal tahun 1980-an yang lalu. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proyek-proyek pembangunan. Pada gilirannya, kebijakan pemerintah ini telah mendorong tumbuh dan munculnya berbagai kelompok atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Kegiatan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) ini, baik yang dilakukan sendiri-sendiri atau yang dilakukan berkerja sama dengan pemerintah, telah mencakup banyak sector, seperti usaha kecil dan perkreditan, kesehatan, penyediaan air bersih dan sanitasi, perbaikan lingkungan pedesaan, kependudukan dan keluarga berencana, dan sebagainya.

Pada dekade 80-an, muncul berbagai LSM yang bergerak dalam bidang advokasi, yang melakukan berbagai pembelaan terhadap rakyat yang menjadi korban pembangunan, seperti pencemaran lingkungan, pembelaan terhadap rakyat yang tergusur, pembelaan terhadap hak-hak buruh, hak-hak kaum perempuan dan lain-lain. Hal ini tampaknya sejalan concern dan keprihatinan global terhadap lingkungan hidup dan hal-hak asasi manusia. Saat ini banyak muncul dan tumbuh LSM-LSM baru yang memounyai kepedulian untuk turut mengembangkan dan memberdayakan kekuatan rakyat dalam berbagai wilayah kehidupan.

Dengan demikian, letak keuatan LSM, menurut Aswab Mahasin (Agenda LSM menyongsong tahun 2000, 1997: 5), berada dalam usaha membela kepentingan masyarakat yang dilayaninya, baik melalui perundingan dengan pihak yang berwenang, penciptaan pendapat melalui media masa, upaya-upaya pendampingan, public hearing, dengan wakil-wakil rakyat dan sebagainya.

G. Mengembangkan Kepemimpinan Masyarakat

Melihat sejumlah problem umat yang kian ruwet dan kompleks yang dihadapi imasyarakat—beberapa di antaranya telah dikemukakan, yakni problem kemiskinan penguasa basic life skill dan problem ekonomi—maka untuk masa-masa yang akan datang diperlukan model pemimpin masyarakat yang tangguh dan mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Salah satu sumber pokok dari adanya krisis yang sedang mendera Indonesia saat ini adalah akibat tiadanya pemimpin yang

bisa dipercaya dan diterima banyak kalangan. Pemimpin-pemimpin zaman sekarang cenderung tidak peduli terhadap kepentingan orang lain dan lingkungannya. Menurut Soetjipto Wirosardjono (1990), munculnya krisis kepemimpinan disebabkan oleh makin langkanya kepedulian mereka pada kepentingan banyak orang, kepentingan lingkungan masyarakatnya. Dalam pandangan Mas Tjip (1990), paling tidak ada tiga masalah mendasar yang menandai kekurangan itu,

Pertama, adanya krisis komitmen. Kebanyakan orang tidak merasa mempunyai tanggung jawab untuk memikirkan dan mencari pemecahan masalah bagi kemaslahatan banyak orang; masalah harmoni dalam kehidupan dan masalah kemajuan dalam kebersamaan. Mereka menganggap itu sebagai tugas pemerintah dan politisi profesional.

Kedua, adanya krisis kredibilitas. Agaknya sulit untuk mencari pemimpin atau kader pemimpin yang mampu menegakkan kredibilitasnya dengan tangguh. Menurut Soetjipto (1990) kredibilitas itu dapat diukur, misalnya, dengan melihat kemampuan untuk menegakkan etika memiul amanah. Menurut Dean Tjosvold dan Mary M Tjosvold (1995: 50), kejujuran—dalam memanggul amanah—adalah pangkal dari kredibilitas seorang pemimpin.

Dalam kacamata Soetjipto (1995: 127), kredibilitas pemimpin itu berarti juga kesetiaan kepada janji dan kesepakatan. Seorang pemimpin yang kredibel adalah tokoh yang mampu bersikap teguh dalam pendirian. Ia ingin juga jujur dalam memikul tugas dan amanah yang dibebankan kepadanya. Dan di atas segalanya, kredibilitas diukur oleh kuatnya iman dan kemampuan menolak godaan dan peluang untuk menyimpang. Kebesaran Nehru, sebagaimana dikatakan Goenawan Mohamad (1994), adalah karena ia berhasil menolak setiap kesempatan untuk menyimpang yang dijumpainya.

Ketiga, semakin kompleks dan rumitnya masalah yang dihadapi masyarakat. Tantangan yang dihadapi masyarakat semakin berat, kompleks, dan ruwet.

Kepemimpinan yang hanya mengandalkan bakat dan keturunan saja tidak cukup. Dan, tidak ada lagi pemimpin bodoh dan tidak peka yang bisa diterima dengan ikhlas oleh para pengikutnya. Kepemimpinan zaman sekarang juga tidak mungkin lagi mengandalkan kekuatan fisik, kelicikan, intimidasi, dan terror. Pemimpin zaman sekarang adalah pemimpin yang mampu belajar, mampu menangkap ruh zaman (*zat geist*), mampu membaca konteks, serta mampu membaca dan menyerap aspirasi orang-orang yang dipimpinnnya. Jika tidak demikian, ia akan menjadi bahan tertawaan dan dilecehkan orang, sekalipun dari luar orang-orang pura-pura tunduk karena suap, atau takut oleh intimidasi dan pemaksaan dalam berbagai bentuknya.

Ketiga faktor yang telah dijelaskan di atas merupakan tuntutan perkembangan zaman yang tidak bisa ditolak lagi. Hanya pemimpin yang memiliki komitmen, kredibilitas, dan integrasi sajalah yang akan bisa bertahan dan tegak di atas kepemimpinannya. Kalau tidak, ia hanya akan menjadi karikatur pajangan yang akan menjadi cermin dan bahan tertawaan dalam kurun sejarah kehidupan masyarakat kelak dikemudian hari.

Jefferson James (*Thinking in the Future Tense*, 1999), membantu mengidentifikasi sejumlah karakteristik –tepatnya keterampilan, *skill* –yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, ia bisa menjadi tumpuan banyak orang. Karakter atau keahlian yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang hebat, menurut Jefferson (1999), diantara, adalah:

1. Memiliki keterampilan perspektif. Maksudnya, dengan kecerdasan yang dimilikinya, seorang pemimpin yang hebat mampu melihat segala sesuatu dari sudut yang tidak pernah

dipikirkan orang banyak. Ia mampu melihat berbagai persoalan dari sudut pandang yang cerdas dan memikat, walaupun persoalan yang dilihatnya sama dengan yang dilihat banyak orang. Ujung-ujungnya, ia akan sanggup menawarkan alternative pemecahan yang juga tidak pernah dibayangkan oleh banyak orang. Misalnya, ia melihat selama ini para muballigh dalam kegiatan dakwahnya terlampau sibuk ‘mengurus dan memanjakan’ Tuhan. Tema-tema dakwahnya hanya berputar-putar pada masalah-masalah keimanan-surga-neraka. Sementara persoalan-persoalan konkret yang dihadapi masyarakat diabaikan begitu saja. Ini persoalan cara melihat sebuah permasalahan. Atau, misalnya, seorang pemimpin yang hebat akan melihat betapa omong kosongnya pembicaraan tentang penciptaan masyarakat madani kalau selama ini umat lebih banyak diperlakukan sebagai mualaf-mualaf yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun pengetahuan agamanya tidak pernah beranjak. Ini ditujukan dengan tema-tema dakwah yang melulu berputar0putar pada wilayah akidah-surga-neraka. Bukankan itu adalah materi pada periode mekah. Bagaimana mungkin kita berbicara tentang masyarakat madani (Madinah), kalau umat tetap dibuat betah di Mekah. Ini rahasia pertama dari seorang pemimpin yang hebat: membaca dengan mata yang berbeda.

2. Memiliki kemampuan dalam memaksimalkan potensi yang ada. Atau kalau menggunakan bahasa fisika; memiliki kesanggupan mengubah energy potensial menjadi energy kinetic. Seorang pemimpin yang hebat adalah seorang yang mampu mensinergikan berbagai kekuatan yang dimiliki oleh umat; mengubah potensi menjadi aksi yang memiliki kemaslahatan sosial yang lebih besar. Dalam bahasa yang sederhana, bisa dikatakan, seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang memiliki keterampilan manajerial yang canggih. Sebab, sebagaimana dikatakan oleh Heinz Weirich

dan Harold Koonz (1994: 4), “one of the most important human activities is managing.” Sebentar lagi kita akan memasuki abad global. Kemajuan ekonomis suatu lembaga, perusahaan, dan bangsa sangat ditentukan oleh managerial skill-nya: technical skill, human skill, conceptual skill, dan design skill. Supremasi intelektualitas hanya akan make sense dan make money jika dibarengi oleh supremasi profesional. Masa depan, kata ‘ayatullah’ manajemen modern Peter F Drucker, adalah milik professional- akademisi dan akademisi-profesional. Di abad global, bertindak sesuai dengan ruh zaman adalah kata kunci yang tidak bisa diabaikan siapapun; dan itu meniscayakan seorang pemimpin yang mengerti persis dunia manajemen. Sebuah ungkapan bijak yang diduga dari Imam Ali menyebutkan: kejahatan yang dikelola dengan baik akan mengalahkan kebaikan yang tidak disentuh dengan manajemen yang baik. Alhasil, apapun, tanpa sentuhan manajemen yang tepat, akan cenderung sia-sia. Managerial skill, dengan kata lain, adalah rahasia berikutnya yang harus dimiliki seorang pemimpin masyarakat.

3. Memiliki kesanggupan dalam memaknai symbol-simbol. Abad ini adalah abad symbol, atau abad imagologi dalam terminology Milan Kundera. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang mampu memaknai dan menerjemahkan symbol-simbol, dan tidak berhenti pada symbol-simbol itu sendiri. Misalnya, seorang pemimpin yang baik tidak memulu melihat masjid sebagai symbol pusat peradaban manusia. Perbedaan dalam memaknai symbol ini akan berakibat pada perbedaan dalam memperlakukan masjid.
4. Memahami dan mengapresiasi berbagai macam kecerdasan. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang sangat memahami adanya dinamika kecerdasan yang dimiliki manusia, dan berusaha memfasilitasi dan

mengembangkannya. Dengan mensinergikan berbagai kecerdasan tadi, akan banyak manfaat yang bisa diterima dan dirasakan rakyat.

5. Apresiatif terhadap berbagai keunggulan baru. Seorang pemimpin yang cerdas adalah seorang yang sangat terbuka dan gembira dalam menerima setiap keunggulan yang datang dari manapun. Dengan keterbukaan yang dimilikinya, seorang pemimpin yang cerdas akan mengapresiasi dan merebut keunggulan yang dimiliki orang atau pihak lain –tidak peduli siapa –untuk kemudian ia terapkan demi kemaslahatan masyarakat yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang membekalkan dirinya dengan berbagai bekal metodologi, pendekatan, strategi, dan paradigma, serta berbagai alat analisis problem umat, baik yang lama atau terutama yang baru.

Dan di atas segalanya, seorang pemimpin yang dapat diterima adalah pemimpin yang betul-betul menerima dan menjalankan kepemimpinannya semata-mata sebagai amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan sesama manusia dan pengadilan *Qadhi Robbul jalil*.

Bab 5

Diskusi Mendalam

A. Pengembangan Masyarakat untuk Apa?

Pengembangan masyarakat telah lama menjadi bahan diskusi, terutama bagi para pelaku peneliti dan akademisi sosial. Hasil diskusi tersebut melahirkan banyak konsep dan juga teori, mulai dari Barat hingga Timur. Mulai dari kaca mata global hingga kaca mata lokal. Dan hal ini menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat itu penting untuk dibicarakan dan juga diimplementasikan, baik dalam bentuk kebijakan maupun program.

Gagasan pengembangan masyarakat muncul sebagai diskursus keilmuan dalam hal merespons berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat terutama pada akhir abad ke 20 (Zubaedi, 2013). Dan konsep pengembangan masyarakat tumbuh menjadi sebuah gerakan sosial yang menghendaki masyarakat bebas dari ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik. Pengembangan masyarakat lahir untuk orang-orang terpinggirkan, untuk orang-orang (masyarakat) lemah supaya memiliki daya (*power*) untuk mengubah keadaannya menjadi lebih baik.

Dalam konteks masyarakat kecil, pengembangan masyarakat dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan, mendapatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan memberdayakan secara bersama-sama. Masyarakat kecil dilihat sebagai objek pengembangan masyarakat karena kelompok masyarakat ini merupakan kelompok yang rentan terhadap masalah. Adapun masalah yang dimaksud adalah masalah sosial, masalah ekonomi, maupun masalah politik.

Terminologi pengembangan masyarakat merujuk pada pekerjaan profesional sebagai sebuah metode atau pendekatan dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Secara profesional

merupakan sebuah komponen dalam kerja pelayanan kemanusiaan, atau sebuah pemikiran dan pendekatan intelektual terhadap dunia dan aktivitas politik.

Pengembangan masyarakat didasari pada sebuah cita-cita bahwa masyarakat bisa dan harus mengambil tanggung jawab dalam merumuskan segala kebutuhan, mengusahakan kesejahteraan, mengelola sumber daya dan mewujudkan tujuan hidup mereka sendiri. Cita-cita ini yang selalu dipegang dalam setiap upaya pengembangan masyarakat, dan layaknya sebuah cita-cita, pengembangan masyarakat berdiri sebagai sebuah konsep yang menawarkan metode bagi para profesional untuk dapat membantu (sebagai profesional yang melakukan pelayanan sosial) masyarakat untuk keluar dari segala persoalan yang dihadapinya.

Tujuan lain daripada pengembangan masyarakat adalah membentuk sebuah masyarakat yang terstruktur dan di dalamnya difasilitasi tumbuhnya angka partisipasi masyarakat secara demokratis dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam hal ini diperlukan suatu upaya pembentukan proses yang dapat melahirkan akses terhadap sumber daya, mampu mengontrol sumber daya dan struktur kekuasaan di masyarakat.

1. Keadilan Sosial

Keadilan sosial menjadi prinsip penting dalam pengembangan masyarakat dan pengembangan pusat-pusat pelayanan masyarakat. Keadilan sosial (social justice) bekerja saling melengkapi dengan perspektif ekologi. Keduanya sesungguhnya tidak bisa saling dipisahkan. Keadilan sosial tidak lengkap tanpa adanya perlindungan terhadap kelestarian ekologi (perspektif ekologis). Keduanya berperan sebagai fondasi bagi pengembangan masyarakat.

Kebijakan kenaikan pajak minyak bumi bagi kendaraan bisa menimbulkan masalah bagi para pengguna kendaraan bermotor. Dampaknya adalah orang-orang dengan standar kehidupan

menengah ke bawah akan semakin “sulit hidup dan orang-orang tersebut tidak bisa dengan nyaman menggunakan minyak bumi untuk transportasi, perumahan dan lain-lain. Dalam hal ini, perspektif keadilan sosial melihat permasalahan diatas hanya dari satu elemen yang melibatkan sektor transportasi. Perspektif global menempatkan pertimbangan implikasi global dalam aktualisasi keadilan sosial (social justice).

Perspektif global menjadi perhatian utama dari gerakan “Green Peace”, sebagai bagian dari upaya mereka dalam menyelamatkan planet bumi dari kehancuran/kepunahan. Mereka menekankan bahwa para penguasa dan pemimpin harus melihat dunia secara global, sebagai “single system”. Dengan perspektif global maka masalah-masalah lingkungan/pembangunan akan bisa dipecahkan bersamasama secara internasional. Ketika dunia dihadapkan pada masalah hujan asam, rumah kaca (green house”, penipisan ozone dan lain-lain akan di pikirkan dan dipecahkan secara bersama-sama oleh semua bangsa.

Globalisasi seringkali dikaji dan dipahami hanya dari aktifitas ekonomi. Pemahaman yang dikenal hingga kini adalah melihat globalisasi hanya dari kaca mata ideologi tentang perdagangan bebas (free trade) dan rasionalisasi ekonomi. Namun belakangan, ada pemahaman/kajian yang menunjukkan suatu kemungkinan adanya globalisasi dari bawah (globalization from below). Globalisasi dari bawah ini mengupayakan suatu integrasi antara Green movement (gerakan hijau) dengan perspektif keadilan sosial (social justice), dengan mengembangkan paham-paham internasional (perspektif global) yang diangkat dari bawah (below). Tampaknya integrasi ini berdampak positif dan signifikan bagi pengembangan masyarakat. Term keadilan sosial sering digunakan dalam berbagai makna. Dalam kerangka pengembangan masyarakat, term keadilan sosial dibangun di atas enam prinsip yaitu: ketimpangan (structural disadvantage), pemberdayaan (empowerment), kebutuhan (needs), hak asasi manusia (human rights, perdamaian tanpa kekerasan

(peace non-violence) dan demokrasi partisipatif (participatory democracy) (Ife, Jim, 1997: 51).

a) Ketimpangan Struktural

Teori keadilan yang dikonsepsikan oleh John Rawls (1972) biasanya menjadi starting point (titik berangkat) dalam diskusi tentang keadilan sosial. Dia menyimpulkan, ada beberapa prinsip yang menjadi kriteria sebuah keadilan. Pertama, persamaan dalam kebebasan-kebebasan dasar. Kedua, persamaan kesempatan untuk maju. Ketiga, diskriminasi positif bagi rakyat jelata untuk memastikan persamaan.

Ketiga prinsip ini dalam perkembangannya dirasakan belum memadai dalam merespon semua problem sosial dan isu sosial yang muncul di era kontemporer. Oleh karena itu, Taylor Gooby dan Dale (1991) membangun beberapa perspektif dalam membahas isu-isu sosial, yang meliputi: perspektif individual, reformis struktural, struktural dan sesuai dengan perkembangan literatur terbaru bisa ditambahkan dengan perspektif post struktural. Dengan perspektif individual, masalah-masalah sosial dilihat sebagai masalah individu. Oleh sebab itu, perlu diupayakan solusi-solusi yang berbasis individual.

Misalnya: kemiskinan, kejahatan, bunuh diri, depresi dan pengangguran dilihat sebagai akibat dari pengaruh penyakit (baik psikologis, biologis atau moral) dalam diri individu. Solusi yang dilakukan berpijak pada terapi atau pengobatan secara individual seperti bimbingan, nasihat moral, hukuman, pengobatan medis atau penyesuaian perilaku. Dengan perspektif reformis institutional, problem sosial ditempatkan dalam struktur kelembagaan dari sebuah tatanan masyarakat.

Dengan demikian, kurang memadainya sistem (peradilan, kepolisian dan penjara dan lain-lain dilihat sebagai penyumbang terjadi masalah kejahatan dan penyimpangan. Tidak memadainya atau tidak efektifnya sistem jaminan sosial dianggap telah mengakibatkan kemiskinan. Oleh karena itu, solusi yang dirancang untuk memecahkan masalah sosial itu adalah dengan melakukan perbaikan, penguatan dan pengembangan kelembagaan seperti rumah sakit, sekolah, lembaga peradilan, klinik, kantor sosial, lembaga amal dan pelayanan bagi para pengangguran.

Adapun perspektif struktural melihat problem sosial bersumber dari struktur sosial yang timpang dan menindas. Pendekatan ini cenderung menyalahkan sistem yang melanggengkan budaya patriarkhi, kapitalisme, rasisme kelembagaan, ketidak-adilan pembagian income dan lain-lain. Sistem yang bercorak demikian diidentifikasi telah menyebabkan terjadinya penindasan dan ketidak-adilan struktural. Oleh karena itu, resep mereka untuk memecahkan masalah sosial dan membuat perubahan adalah melakukan penataan kembali struktur masyarakat seperti kelas sosial, ras maupun jender.

Perspektif yang terakhir adalah pos-strukturalis. Perspektif ini merujuk pada karya-karya Foucault (1972, 1973, 1979) dan beberapa penulis pos modernis. Mereka adalah penulis yang menaruh perhatian tentang “discourse (wacana)” yang berhubungan dengan problem khusus. Menurut mereka, problem muncul akibat penggunaan bahasa, pemilihan makna, pembentukan dan akumulasi pengetahuan dan berbagai cara yang digunakan untuk mengontrol dan mendominasi melalui penentuan konformitas (kecocokan), perbuatan yang pantas dan lain-lain. Perspektif ini menolak pemahaman

bahwa realitas adalah obyektif dan pasti sebagaimana dianut oleh kebanyakan penganut perspektif struktural.

Perspektif post struktural menyalahkan wacana yang dipakai oleh perspektif struktural. Perspektif ini kurang peduli dengan pemecahan masalah. Akan tetapi, ia cenderung mengarah pada upaya mendefinisikan kembali wacana, melakukan pemahaman dengan sharing pengetahuan dan makna-makna, membolehkan orang-orang mengakses wacana dan pemahaman serta melakukan pemahaman dalam rangka mencari titik-titik kelemahan pada aturan-aturan pokok berwacana yang mungkin telah dieksploitasi untuk tujuan-tujuan politik tertentu.

b) Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata (Eddy Ch. Papilaya, 2001: 1).

Menurut Chambers, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat “peoplecentered”, participatory, empowering, and sustainable. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net). Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dua konsep

pokok yakni: konsep power (“daya”) dan konsep disadvantaged (“ketimpangan”). Pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan dengan menggunakan empat perspektif yaitu: perspektif pluralis, elitis, strukturalis dan post-strukturalis.

Berdasarkan pengalaman, upaya memberdayakan kelompok masyarakat yang lemah dapat dilakukan dengan tiga strategi. Pertama, pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Kedua, pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif. Ketiga, pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka (Ife, Jim, 1997: 63-64).

c) **Kebutuhan**

Ada dua cara yang perlu dilihat sebagai dasar bagi keadilan sosial dan pengembangan masyarakat. Pertama, adanya sebuah keyakinan bahwa orang atau masyarakat menginginkan agar kebutuhankebutuhannya dapat terpenuhi. Kedua, orang atau masyarakatnya seharusnya bisa menentukan sendiri kebutuhan-kebutuhannya.

Menurut pandangan positivis tradisional, kebutuhan dianggap sebagai realitas obyektif, bebas nilai dan diukur. Dengan demikian, “need assessment (pengukuran kebutuhan) dianggap sebagai teknis yang sudah teruji secara metodologis dalam mengukur sebuah kebutuhan.

Berdasarkan pada metodologi dan keahlian teknis, kebutuhan masyarakat pada suatu situasi hanya bisa diukur dan ditentukan secara memadai oleh para ahli yang trampil dalam menggunakan metodologi need assessment.

Oleh karena itu, penentuan kebutuhan tidak dilakukan oleh warga masyarakat yang memiliki kebutuhan dan diletakkan di tangan para penentu kebutuhan yang profesional seperti pekerja sosial, peneliti sosial, ahli psikologi dan lain-lain. Dengan perspektif ini, Bradshaw membagi kebutuhan menjadi empat. Pertama, kebutuhan normatif (normative need), yaitu kebutuhan yang dirumuskan oleh para penguasa, sesuai dengan standar yang diterima (seperti batas-batas kemiskinan). Kedua, kebutuhan yang dirasakan (felt need), yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh orang-orang yang mau menaruh perhatian. Kebutuhan ini diuji misalnya, melalui survei sosial.

Ketiga, kebutuhan yang diungkapkan (expressed need), yaitu kebutuhan yang diungkapkan oleh orang-orang yang mencari berbagai bentuk pelayanan (diuji melalui pengamatan daftar tunggu, pesanan pelayanan dan lain-lain). Keempat, kebutuhan komparatif (comparative need), yaitu kebutuhan yang merujuk pada perbandingan pemenuhan layanan dengan ukuran nasional atau regional.

Pembagian kebutuhan menurut Bradshaw ini didasarkan pada perumusan kebutuhan yang dibuat oleh para ahli dan konsepnya tentang kebutuhan secara esensial masih berada dalam kerangka positivis. Beberapa ahli menolak perspektif positivis tradisional ini. Illich menganggap perspektif itu dibangun karena meningkatnya kekuatan kaum profesional. Perspektif ini membawa konsekuensi pada melemahnya kekuatan

masyarakat yang lebih besar. Oleh karena itu, perspektif profesional ini bersifat konvensional karena didasarkan pada asumsi bahwa ketidak-berdayaan masyarakat cenderung memperlemah kondisi yang telah ditindas serta tidak mengakui hak masyarakat untuk menentukan dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebaliknya, dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, kebutuhan bukan bebas nilai dan obyektif. Alangkah baiknya, kebutuhan dipahami dalam perspektif yang menggunakan perhitungan nilai-nilai, ideologi dan mengembangkan pemikiran liberasi bukan penindasan.

d) Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) menjadi masalah mendasar dalam setiap memahami keadilan sosial. Dalam memahami HAM, terdapat kontroversial antara pandangan universalistik dan relativistik. Pandangan pertama, yang di anut oleh negara-negara Barat dan organisasi nonpemerintah seperti Badan Amnesti Internasional menekankan bahwa HAM itu bersifat universal dan absolut.

Oleh karena itu, HAM dapat dan harus diterapkan di seluruh masyarakat dan lingkungan tanpa pandang bulu. Pandangan kedua, yang dianut oleh sebagian negara Asia menekankan bahwa HAM harus dipahami dalam konteks budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, HAM bersifat relatif. Sementara pemahaman HAM yang dominan sejauh ini esensinya hanya mewakili konsepsi kalangan Barat.

Pandangan HAM yang universalistik ini dikritik sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan yang opresif. Namun dalam konteks pengembangan masyarakat, pandangan HAM yang universalistik lebih berguna dalam menyediakan kerangka kerja dalam yang sesuai dengan perspektif keadilan sosial. HAM

universalistik ini berdasarkan Deklarasi Universal HAM PBB 1948, yang isinya berupa pengakuan terhadap hak untuk hidup dan kebebasan, hak persamaan di mata hukum, hak bebas dari ketakutan, bebas berorganisasi, perlindungan terhadap diskriminasi dan lain-lain.

Ada juga dua perjanjian internasional PBB yang mengakui hak-hak asasi manusia seperti hak untuk bekerja, hak mendapatkan pendapatan memadai, hak untuk berpendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, pakaian dan perumahan, hak untuk bergabung dalam organisasi dan lain-lain. Negara-negara yang meratifikasi perjanjian ini memiliki tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan hak asasi manusia dan bisa dimintai pertanggung-jawaban jika tidak melaksanakannya.

Beberapa pernyataan dalam dokumen ini memiliki implikasi signifikan dan bisa digunakan dalam pengembangan masyarakat sebagai legitimasi terhadap program-program pemberdayaan. Perlu dijelaskan bahwa hak asasi berhubungan dengan tanggung jawab dan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban. Hal ini berjalan dalam dua level: hal yang paling mendasar bahwa kewajiban terhadap orang lain mengikuti hak-hak asasi orang tersebut. Dengan demikian, ada sebuah pernyataan bahwa orang memiliki hak untuk bebas berbicara dengan implikasi bahwa semua orang mempunyai kewajiban untuk tidak menolak hak orang berbicara bebas. Di sini, ada pernyataan tentang hak asasi yang menekankan beberapa pembatasan terhadap kebebasan terhadap orang lain. Masalah ini penting bagi kerja kemasyarakatan, di mana hak dan tanggung jawab sangatlah penting, yang keduanya berhubungan erat. Dalam perspektif keadilan sosial, upaya mengembangkan hak-hak asasi masyarakat lapis bawah menuntut tiga

pendekatan yang saling berkaitan. Pertama, mereka harus dibantu untuk mengetahui hak-haknya. Kedua, mereka harus dibantu untuk menuntut dan menentukan hak-haknya. Ketiga, mereka harus dibantu untuk mewujudkan dan menggunakan hak-haknya. Ketiga pendekatan ini menjadi model yang relevan untuk kegiatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

2. Kesejahteraan Sosial

Kemiskinan dan kesejahteraan sering kali menjadi dua hal yang kontradiktif dalam pandangan masyarakat, jika tidak sejahtera barang kali kita adalah kelompok miskin. Dan Indonesia kini penduduk miskin merupakan persoalan yang paling utama. Penduduk miskin tidak hanya hidup di daerah perdesaan, bahkan di perkotaan penduduk miskin masih menempati urutan yang utama dalam upaya penyelesaian masalah sosial.

Bahkan kini, desa bukan lagi satu-satunya daerah yang memiliki keterbatasan akses melainkan kota juga dapat berpotensi menjadi wilayah yang kekurangan akses. Akses yang dimaksud adalah lapangan pekerjaan, fasilitas publik, layanan kesehatan, dan juga layan sosial. Akses tersebut sering kali menjadi kendala dalam menentukan kelompok miskin.

Tujuan pertama yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensi harus diakhiri dengan memberantas kemiskinan ekstrim di tahun 2030. Ini menjadi tantangan yang bersifat global dan menjadi persyaratan yang sangat diperlukan untuk mengusung keberlanjutan hidup masyarakat. Adapun target SDGs yang terkait dengan kemiskinan bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan ekstrim tersebut dapat dengan mengurangi separuh porsi baik laki-laki, perempuan, dan anak dalam segala usia yang hidup dalam garis kemiskinan. Hal penting yang dipersiapkan dalam hal ini adalah terbentuknya sistem perlindungan sosial nasional yang berlaku untuk semua orang, baik yang miskin dan rentan.

Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan menjadi salah satu agenda utama Pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Hal ini telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Menjalankan agenda tersebut, memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha (sektor swasta), dan masyarakat.

Meskipun berbagai upaya pemerintah pusat, dan daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan kerentanan telah dilakukan, jumlah penduduk miskin dan rentan miskin masih tetap tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 adalah 28,01 juta orang (10,86%). Selain itu, orang yang berada di atas garis kemiskinan rentan jatuh miskin jika menghadapi guncangan atau krisis ekonomi. Kesenjangan distribusi pendapatan juga semakin melebar, hal ini terlihat dengan meningkatnya gini rasio Indonesia dari 0,35 pada tahun 2009 menjadi 0,40 pada September 2015. Demikian pula kesenjangan antara wilayah perdesaan dan perkotaan masih tinggi. Pada Maret tahun 2016 proporsi penduduk miskin perdesaan sebesar 14,11% lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan 7,79%.

Selanjutnya, banyak kasus keluarga miskin dan rentan miskin tidak menerima layanan perlindungan sosial secara komprehensif walaupun layak menjadi penerima bantuan. Pelayanan dan penanganan masalah sosial yang belum optimal bersumber dari cara pemahaman dalam mengatasi masalah sosial yang mengabaikan keterpaduan dalam proses penanganannya. Penanganan masalah sosial yang dilakukan berdasarkan paradigma pelayanan sektoral saat ini belum terarah kepada sasaran pelayanan dan tidak dilaksanakan secara berkelanjutan.

Masih banyak program pelayanan sektoral yang masih berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga/institusi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat selain harus terarah dan berkelanjutan, juga harus terpadu.

One stop services terobosan Pemerintah sebagai salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan warga miskin, khususnya dalam aspek: kesehatan, pendidikan, dan sosial-ekonomi, dapat menginspirasi daerah lain dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan warganya sesuai karakteristik daerah masing-masing (Muhtar & Huruswati, 2015)

Salah satu bentuk dari mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dengan turut sertanya peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di desa/ kelurahan. Puskesmas berkedudukan di desa atau kelurahan sebagai lini terdepan (front line) yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung, yaitu aksesibilitas layanan sosial, pelayanan sosial untuk rujukan, pelayanan sosial untuk advokasi, serta penyedia data dan informasi.

Dasar hukum pelaksanaannya antara lain Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana Pasal 35 Sarana dan prasarana salah satunya adalah Pusat Kesejahteraan Sosial. Undang-undang tersebut di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bab VI Standar Sarana dan Prasarana pada Pasal 37 Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diantaranya adalah Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas). Pasal 44 Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dimaksudkan

sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Puskesmas bertujuan untuk mensinergikan berbagai potensi dan sumber daya masyarakat, memperkuat jaringan-jaringan sosial, dan membangun kebersamaan dalam mengatasi permasalahan sosial di tingkat lokal, kedudukan puskesmas berkedudukan di tingkat desa/ kelurahan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberi informasi atas beberapa pertanyaan berikut: 1) Bagaimana kemiskinan dalam perspektif pekerjaan sosial? 2) Bagaimana situasi kemiskinan di Indonesia? 3) Bagaimana upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan? 4) Bagaimana penanggulangan kemiskinan melalui Puskesmas?

Diharapkan temuan kajian ini akan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi program penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak kewarganegaraan. Lebih jauh lagi tulisan ini dapat memberikan masukan pada pemerintah akan pentingnya Puskesmas dalam menangani kemiskinan di Indonesia.

1. Kemiskinan dalam Perspektif Pekerjaan Sosial

Apakah Salah satu permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia yang senantiasa menuntut keterlibatan pekerjaan sosial dalam penanganannya adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan berbanding terbalik dengan kesejahteraan. Sehingga tujuan dari program penanggulangan kemiskinan adalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan sosial didefinisikan dalam berbagai perspektif, yaitu 1) kesejahteraan sosial sebagai sebuah aktivitas atau sistem yang terorganisasi, 2) sebagai kondisi sejahtera dan 3) sebagai disiplin ilmu (Suharto, 2005; Adi, 2012; Fahrudin, 2012). Memperhatikan perspektif dalam mendefinisikan kesejahteraan sosial, maka kesejahteraan sosial yang digunakan, yaitu kesejahteraan sebagai kondisi sejahtera (well-being). Konsep

kesejahteraan sosial yakni suatu keadaan yang lebih baik, kebahagiaan dan kemakmuran yang terdiri dari tiga elemen yang sangat penting yaitu:

“A condition of social welfare (or social well-being) is conceived of as comprising three elements. They are, first, the degree to which social problems are to be managed. Second, the extent to which needs are met and finally, the degree to which opportunities for advancement are provided. These three elements apply to individuals, families, groups, communities and even whole societies. (Midgley, 1995)”

Dikemukakan oleh Midgley et.al. bahwa kesejahteraan sosial sebagai “a condition or state of human well-being”. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya. Mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kemampuan orang secara individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dan sistem sosial yaitu lembaga dan jaringan sosial dalam memenuhi/ merespon kebutuhan dasar, melaksanakan peranan sosial, serta menghadapi guncangan dan tekanan (shocks and stresses). Kebutuhan dasar berkaitan dengan pendapatan, pendidikan dan kesehatan. Peranan sosial dimaksud sesuai dengan status sosial, tugas-tugas dan tuntutan norma lingkungan sosialnya. Kemudian, guncangan dan tekanan terkait dengan masalah psikososial dan krisis ekonomi.

Berdasarkan konsep tersebut maka konotasi kesejahteraan sosial lebih luas, merujuk pada satu kondisi sosial dan bukan pada kegiatan amal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok filantropi, dan juga bukan bantuan publik yang diberikan oleh pemerintah. Kesejahteraan sosial akan terjadi ketika keluarga, masyarakat semua mengalami kesejahteraan sosial. Sejalan dengan pendapat tersebut

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagai berikut: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Mengacu pada konsep tersebut, maka kesejahteraan merupakan suatu hal ideal yang ingin dicapai oleh setiap orang. Usaha untuk mencapai kesejahteraan tak dapat berjalan secara mulus, tetapi terdapat berbagai hambatan dan kendala. Demikian pula untuk mengukur sejauh mana tingkat kesejahteraan seseorang atau sekelompok orang agak sulit untuk menentukan indikatornya. Meskipun demikian pemerintah berusaha memberikan garis kebijakan sebagai kerangka acuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan seseorang. Sejalan dengan hal tersebut diatas, tujuan kesejahteraan sosial menurut Zastrow adalah:

“The goal of social welfare is to fulfill the social, financial, health, and recreational requirements of all individuals in a society. Social welfare seeks to enhance the social functioning of all age groups, both rich and poor. When nother institutions in our society, such as the market economy and the family, fail at times to meet the basic needs of individuals or groups of people, then social services are needed and demanded (Zastrow, 2004).

Jadi, kesejahteraan menurut Zastrow (2004) adalah memenuhi kebutuhan sosial, finansial kesehatan dan rekreasional bagi individu dalam masyarakat. Haryanto dan Tomagola (1997), menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dasar (basic needs), dan yang termasuk ke dalam jenis-jenis kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, papan dan kesehatan. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar (basic needs), dan yang termasuk ke dalam jenis-jenis kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, papan dan kesehatan.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mendefinisikan kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial. Berdasarkan pengertian tersebut, kebutuhan material merupakan kebutuhan manusia yang berkaitan dengan aspek fisiologis.

Apabila manusia sudah mampu memenuhi kebutuhannya, maka akan dapat mencapai hidup layak. Menurut Payne (2005), bahwa yang dimaksud dengan hidup layak, yaitu: 1) Economic wellbeing: memiliki pendapatan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, 2) Being Healthy: fisik, mental sehat dan hidup sehat. 3) Staying Safe: hidup aman, dari bahaya dan eksploitasi dan mampu memelihara keamanan diri. Selain mampu hidup layak, manusia yang sudah mampu memenuhi kebutuhan akan mampu mengembangkan dirinya. Dikemukakan oleh Payne (2005), bahwa yang dimaksud dengan mampu mengembangkan diri, yakni: 1) Enjoying dan achieving: hidup bahagia dan mengembangkan keterampilan-keterampilan yang berguna bagi kehidupannya, 2) Making positive contribution: kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan kontribusi pada masyarakat. Selanjutnya, konsep keberfungsian sosial dikemukakan oleh Siporin (Fahrudin, 2012) mendefinisikan keberfungsian sosial sebagai berikut: *social functioning refers to the way individuals or collectivities (families, associations, communities and soon) behave in order to carry out their life task and meet their needs.*

Kesejahteraan sosial dan keberfungsian sosial dapat direalisasikan melalui usaha yang terencana, sistematis dan berkelanjutan serta melembaga dalam bentuk pelayanan sosial. Berbagai terminologi digunakan untuk menjelaskan usaha yang terencana tersebut. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta

memperkuat institusi-institusi sosial. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup: 1) Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial. 2) Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan. 3) Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

Menggunakan terminologi usaha kesejahteraan sosial merupakan suatu program atau pun kegiatan yang didesain secara kongkrit untuk menjawab masalah, kebutuhan masyarakat atau pun meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang ditujukan pada individu, keluarga, kelompok-kelompok dalam komunitas, atau pun komunitas secara keseluruhan baik lokal, regional dan nasional (Adi, 2012).

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 (Pasal 1, ayat 2) menggunakan terminologi penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Menurut UU tersebut, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dari pengertian tersebut diketahui unsur- unsur penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu: 1) Sebagai upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan. 2) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pelaku. 3) Bentuk kegiatannya, yakni pelayanan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar. 4) Sasarannya setiap warga negara

Indonesia. 5) Pendekatan yang digunakan meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

2. Situasi Kemiskinan di Indonesia

Salah satu sasaran utama yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 adalah menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7.0% - 8.0% di tahun 2019. Rapat Paripurna Kabinet Kerja tanggal 4 April 2017, Presiden Jokowi mengarahkan bahwa pagu indikatif RAPBN 2018 harus difokuskan untuk mencapai target pembangunan, salah satunya, menurunkan angka kemiskinan menjadi single digit. Berikut adalah situasi kemiskinan di Indonesia dari tahun ke tahun.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 disebutkan bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dan pada Pasal 6 Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada: perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat. Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, bantuan hukum, pelayanan sosial, dilakukan melalui: pemberdayaan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha, jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin, kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan, koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak selama ini, banyak pihak yang berpendapat masih bersifat parsial, meskipun sebenarnya pemerintah melalui TNP2K telah melakukan upaya penanggulangan kemiskinan secara komprehensif (Purwanto, 2016). Kebijakan dan program pemerintah dalam menangani kemiskinan harus mencakup dalam

tiga level yaitu makro, meso dan mikro karena ketiganya saling berkaitan satu sama lain (Adi, 2012). Pada level macrosystem, merupakan suatu sistem yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan. Pada level ini pemerintah telah menetapkan beberapa undang-undang dan aturan tentang penanganan fakir miskin. Kebijakan pada tingkat Nasional, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir miskin. Pelaksanaan program yang tidak

Koordinatif menjadi permasalahan tersendiri dalam penerapan kebijakan. Pada level Ecosystem, Mesosystem, dan Microsystem dapat dilihat sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing instansi yang membuat keputusan bersama. Pada level Ecosystem, menunjukkan kondisi sosial dimana anak tidak terlibat secara aktif, tetapi akan mempengaruhi individu tersebut. Pada level Mesosystem, menunjukkan hubungan antara dua atau lebih microsystem atau hubungan beberapa konteks. Pada level Microsystem, menunjukkan setting dimana individu hidup, memiliki aktivitas, peran, dan interaksi dengan orang-orang.

Pada penanggulangan kemiskinan, pemerintah saat ini telah menyelenggarakan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui perbaikan serangkaian program perlindungan sosial skala nasional yang mencakup 40% masyarakat berpendapatan terendah, diantaranya Program Rastera sekarang BPNT, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Indonesia Sehat (PIS) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Arahan Presiden dalam sidang kabinet Paripurna 4 April 2017, cakupan PKH ditingkatkan 10 Juta Keluarga (persentil 15, untuk keluarga eligible dengan anak balita, usia sekolah, lansia dan/atau disabilitas). PKH dipandang efektif menurunkan kemiskinan dan ketimpangan: Pada jangka pendek program memberikan tambahan

pendapatan (direct effect) Keluarga Penerima. Untuk jangka lebih panjang terjadi perbaikan perilaku melalui kondisionalitas yang mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan anak (price effect). Terjadi pengurangan pekerja anak. Peningkatan kualitas pelayanan melalui complementary perbaikan akses pendidikan dan kesehatan oleh Pemda Mempercepat pencapaian SDGs tentang kemiskinan, akses pendidikan, kesehatan ibu hamil dan balita, peningkatan kesetaraan jender, dan ketimpangan. Penyaluran PKH secara non tunai dan terintegrasi dengan bantuan lainnya mendorong akumulasi aset/tabungan dan akses layanan keuangan lainnya. Perluasan membutuhkan dukungan lintas sektor dan Pemda untuk meningkatkan kualitas layanan dasar, penguatan pengelolaan MIS dan pendampingan, dan perluasan Family Development Sessions.

Membayarkan premi iuran masyarakat miskin dan rentan kepada BPJS Kesehatan Sinkronisasi Basis Data Terpadu dengan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) Integrasi verifikasi PBI dengan Dinas Dukcapil untuk melengkapi dan menjaga konsistensi data NIK. Meningkatkan pemahaman masyarakat pentingnya promotif dan preventif kesehatan. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan di daerah dengan jangkauan yang sulit. Memastikan ketersediaan obat dan alat kesehatan di Puskesmas.

Perkembangan kepesertaan Program Bantuan Siswa Miskin / Kartu Indonesia Pintar (KIP). Tujuan program untuk menghilangkan halangan bagi siswa miskin untuk memperoleh akses pelayanan pendidikan. Mencegah angka putus sekolah dan menarik siswa miskin untuk bersekolah kembali. Membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan pendidikan, antara lain pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah seperti tas, sepatu, dan kebutuhan lainnya, biaya transportasi ke sekolah, uang saku siswa, dan lainnya. Serta mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun.

Penerima Manfaat: Anak-anak usia sekolah/ siswa dari semua jenjang pendidikan, baik di satuan pendidikan swasta maupun negeri, (SD/ MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Seiring dengan diberlakukannya KIP sejak tahun 2015, penerima manfaat program ini juga diperluas untuk siswa/santri pada pendidikan keagamaan dan siswa yang tidak bersekolah untuk dapat memasuki sistem pendidikan. Selain itu penerima manfaat program ini juga diperluas juga untuk masyarakat yang ingin mengikuti pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C).

Manfaat program bagi anak/peserta didik dari keluarga kurang mampu dapat tetap mengakses pelayanan pendidikan terutama untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun.

Hal ini menandakan kemiskinan dapat menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam hal pelayanan kesehatan dan pendidikan. Diharapkan pemerintah tidak berhenti mengeluarkan kebijakan terkait dengan bantuan sosial dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Pengelolaan bantuan sosial dari pemerintah diharapkan mampu dikelola dengan baik dan efektif oleh pemerintah yang berwenang untuk mengatur berjalannya program bantuan sosial.

Mengoptimalkan capaian hasil dari berbagai program terkait dengan pengentasan kemiskinan telah diambil langkah berupa integrasi program. Diharapkan dengan integrasi program tersebut, penanggulangan kemiskinan dapat mencapai sasaran (Royat, 2007).

Memandang Kemiskinan merupakan suatu fenomena utuh yang memerlukan pendekatan pada tingkat individual, kultural, dan struktural. Kemiskinan dapat menunjuk pada kondisi individu, kelompok maupun situasi kolektif masyarakat. Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Sulit ditemukan bahwa kemiskinan hanya disebabkan oleh faktor tunggal. Seseorang atau keluarga miskin bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait satu

sama lain, seperti mengalami kecacatan, memiliki pendidikan rendah, tidak memiliki modal atau keterampilan untuk berusaha, tidak tersedianya kesempatan kerja, terkena PHK, tidak adanya jaminan sosial (pension, kesehatan, kematian), atau hidup di lokasi terpencil dengan sumber daya alam dan infrastruktur yang terbatas (Aneta, 2012). Masih diperlukan kebijakan yang komprehensif dan terusmenerus (konsisten) untuk memerangi kemiskinan dalam berbagai dimensi, termasuk dimensi kesehatan dengan kebijakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi orang miskin (Suryawati, 2005).

Program-program untuk penanggulangan kemiskinan sudah banyak dilaksanakan di berbagai negara. Strategi pembangunan yang dikembangkan bangsa Indonesia selama ini adalah bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang dianggap tinggi tersebut ternyata tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan pada semua golongan masyarakat (Prawoto, 2008).

Penanggulangan kemiskinan perlu melibatkan masyarakat secara partisipatif. Melalui pola partisipatif lebih memungkinkan proses pembelajaran masyarakat, sekaligus proses perubahan perilaku untuk hidup yang lebih bermartabat. Pola ini juga memungkinkan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan lebih mendasar, menguatkan komitmen kebersamaan diantara masyarakat bahwa penanggulangan kemiskinan bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, tetapi justru menjadi tanggung jawab bersama (Yasa, 2008).

Studi literatur dan observasi lapangan menunjukkan bahwa konsep kemiskinan memiliki banyak sisi, misalnya sisi ekonomi, sosial (kesehatan, pendidikan), kultural, kelembagaan dan politik. Sisi-sisi kemiskinan itu lahir dari penggalian mendalam faktor-faktor penyebab kemiskinan. Misalnya, aspek ekonomi dari sisi kemiskinan adalah kekurangan pangan yang berakibat kelaparan. Kekurangan

pangan dapat terjadi karena produksi rendah, teknologi yang tidak berkembang dan pendapatan rumah tangga yang pas-pasan dan tidak menentu. Oleh karena itu tidak ada satu definisi kemiskinan yang tunggal dan berlaku mutlak untuk semua orang di semua tempat. Konsekuensinya, memahami kemiskinan memerlukan berbagai perspektif sudut pandang (Pattinama, 2009).

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah semata dengan proyek atau program-program pemberdayaan masyarakat, tetapi juga hendaknya merupakan kolaborasi antara aktor-aktor yang ada dalam Negara itu sendiri yang dalam hal ini adalah Negara, swasta, dan masyarakat. Untuk itu diperlukan kolaborasi yang sinergis yang nantinya akan dapat terjalin pola kemitraan yang strategis guna memberdayakan masyarakat. Dalam hubungan kemitraan ini, antara ketiga aktor tadi mempunyai posisi tawar yang sama, sehingga pemerintah bukanlah sebagai aktor yang super power tetapi bagaimana membagi povernya sehingga aktor swasta dan masyarakat dapat mengambil posisi yang tepat dalam pembangunan nasional yang dilakukan. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai proses penyerahan kekuasaan dari pemerintah kepada pihak yang tidak berdaya (masyarakat miskin), supaya dapat memiliki kekuatan untuk membangun, serta meningkatkan daya masyarakat miskin sehingga memiliki kemampuan untuk membangun (Putra, 2007).

Pendekatan pemberdayaan sudah familiar dan telah diterapkan dalam banyak kasus, namun pelaksanaan pendampingan pemberdayaan masih bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, program kebijakan pengentasan kemiskinan masih bersifat menjalankan program rutin yang usianya sepanjang project itu dijalankan. Berbagai program yang telah ditetapkan cenderung tidak berkelanjutan secara sistematis dan kurang dievaluasi secara kontinyu. Evaluasi diperlukan untuk memastikan kemana kebijakan pengentasan kemiskinan akan lebih difokuskan (Fatony, 2017).

Namun demikian, dalam setiap program penanggulangan kemiskinan perlu adanya pendamping. Perlunya tenaga pendamping yang kapabel dalam mengelola program, untuk membantu upaya penyelesaian terhadap berbagai hambatan, terutama yang berkaitan dengan persoalan birokrasi yang rumit (Murdiansyah, 2014). Pemberdayaan komunitas dalam upaya pengentasan kemiskinan dalam pengertian konvensional umumnya dilihat dari pendapatan (income). Oleh karena itu sering kali upaya pengentasan kemiskinan hanya bertumpu pada upaya peningkatan pendapatan komunitas. Pendekatan permasalahan kemiskinan dari segi peningkatan pendapatan (income) saja tidak mampu memecahkan permasalahan komunitas, karena pemberdayaan komunitas bukan hanya masalah ekonomi, namun meliputi berbagai masalah yang kompleks (Utami, 2014). Program daya fisik dan daya sosial lebih berhasil dibandingkan dengan program daya ekonomi (Taufiq, 2010).

Akselerasi penurunan tingkat kemiskinan harus difokuskan pada 40% penduduk dengan status sosial ekonomi terbawah dan wilayah-wilayah kantong kemiskinan melalui optimalisasi pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT). Penyediaan data kemiskinan yang akurat dan menjangkau wilayah terkecil dapat berkontribusi secara signifikan terhadap efektivitas program-program dan penurunan kemiskinan. Dibutuhkan semangat kerja sama antar K/L, antara pusat dan daerah, dan antar para pihak lainnya dalam berbagi data, informasi, sumber daya untuk mempercepat pengurangan kemiskinan.

Kendala dalam program penanggulangan kemiskinan yakni sulitnya mengidentifikasi lokasi di mana orang miskin paling banyak ditemukan dapat diatasi melalui kerjasama yang berjejaring melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu. Pada tingkatan terbawah yaitu desa/kelurahan dilakukan melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS). Pada perkembangannya jumlah Puskesmas yang dibiayai APBN tahun 2016 sebanyak 100 Puskesmas. Tahun 2017 dan direncanakan sampai tahun 2019 akan terbentuk 300 Puskesmas.

Selain itu banyak daerah yang berinisiasi membangun Puskesmas dengan dana APBD.

Ruang lingkup tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Undang-Undang tersebut selanjutnya diperkuat dengan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Mempercepat capaian penanggulangan kemiskinan perlu pembentukan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan yang disebut Puskesmas Hal ini untuk memudahkan warga miskin dan rentan yang ada di wilayah tersebut mengidentifikasi kebutuhan mereka untuk dihubungkan dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah desa/kelurahan. Mereka juga bisa dengan cepat mengidentifikasi keluhan atas program dan layanan yang mereka terima dan memastikan bahwa keluhan-keluhan mereka tertangani dengan baik. Diharapkan membentuk kelembagaan Puskesmas untuk memperpendek jangkauan layanan bagi warga miskin.

Pusat Kesejahteraan Sosial adalah sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Daftar Pustaka

- Abimbola, I. O. (1983). The Relevance of the "New" Philosophy of Science for the Science Curriculum. *School Science and Mathematics*, 83(3), 181-192.
- Abdullah, Irwan. (2008). *Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adam Schwarz. 1994. *A Nation in Waiting Australia*. Allend and Unwing.
- Adi, Isbandi Rukminto. (2012). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat: Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agus Efendi (ed.). *Dasar Pemikiran ISTBQ, makalah pada training ISTBQ*, Unpad dan Depnaker, 3 Oktober 1998.
- Ahmad, Amrullah, (ed.). (1984), *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Prima Duta.
- Alus, C. (2014). *Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sabu di Desa Balisoan Kecamatan Sabu Kabupaten Halmahera Barat*. *Journal "Acta Diurna"*, III(4), 1-16.
- Amsari, F. (1995). *Islam Kaaffah Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aneta, A. (2012). "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo". *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54-65.
- Asyhari, A., & Hartati, R. (2015). *Profil Peningkatan Kemampuan Literasi Sains Siswa Melalui Pembelajaran Saintifik*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika 'Al-BiRuNi*, 4(2), 179-191.
- Asy'arie, Musa. (1991). *Filsafat Islam: Sunnah Nabi dalam Berpikir*, Yogyakarta: LESFI.

- Bahtiar, Asef Permana. (2003). *Dialektika Agama dan Budaya*. Yogyakarta: Muhammadiyah University Press.
- Clark, J. A. (1993). The New Philosophy of Science and Educational Research. *Australian Educational Researcher*, 20(2), 16-22.
- Erich Fromm. (1941). *Escape From Freedom*, USA: Ballantine Books.
- Ernest Gellner. (1992). *Postmodernism, Reason, and Religion*. London and New York: Routledge.
- Fahrudin, Adi, (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Rafika Aditama.
- Fatony, A. (2017). *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Participatory Poverty Assessment: Kasus Yogyakarta*. *Sosio Konsepsia*, 16(2), 123-142.
- Fazlur Rahman. (1983). *Tema Pokok AL-Qur'an*. Bandung: Pustaka.
- Franz Magnis Soeseno. (1994). *Homo Islamicus Menuju Spiritualitas Lingkungan*. *Jurnal Islamika*, edisi Januari-Maret 1994.
- Fred Halliday. (1994). *The Politics of Islamic Fundamentalism*. London and New York: Routledge.
- Frithof Schuon. (1976). *Islam and The Perennial Philosophy*. World of Islam Festival Publishing Company Ltd.
- George Ritzer. (1992). *Classical Sociological Theory*. New York: McGraw-Hill Inc.
- Goenawan Mohammad. (1991). *Catatan Pinggir 1*. Jakarta: GrafitiPers.

- Gregory H. Watson. (1997). *Strategic Benchmarking*, Jakarta: Gramedia.
- Hadiawati, L. (2008). Pembinaan Keagamaan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Siswa Melaksanakan Ibadah Shalat. *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, 2(1), 18-25.
- Haidar Balgin. (1989). *Filsafat Sains-Islami: KEnyataan atau Khayalan?*. Bandung: Mizan.
- Hajaroh, M. (1998). Sikap dan Perilaku Keagamaan Mahasiswa Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi*, 1(1), 19-31.
- Halstead, J. M. (2007). Islamic values: a distinctive framework for moral education? *Journal of Moral Education*, 36(3), 283-296. doi:10.1080/03057240701643056
- Haryanto, Rohado dan Tamrin Amal Tomagola. (1997). *Indikator Keluarga Sejahtera: Instrumen Pemandu Keberdayaan Keluarga untuk Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Ikatan Sarjana Sosiologi Indonesia.
- Herman Soewardi. (1999). *Islamisasi Sains: Apa Signifikansinya?*. Dalam *Mimbar Studi*, Nomor 1 Tahun XXIII, September-Desember, 1999.
- Ihsan Ali Fauzi. (1994). *Kearifan Tradisional dan Bumi Manusia*. *Jurnal Islamika*, Nomor 3, Januari-Maret 1994.
- Ilyas Ba-Yunus. (1994). *Sosiologi Masyarakat Muslim Kontemporer*. Bandung: Mizan.
- Ismail Rizki Al-Faruqi. (1971). *Tawhid: It's Implication for Thought and Life*. Pennsylvania: International Institute of Islamic Thought.
- Jalaluddin Rachmat. (1997). *Catatan Kang Jalal: Visi Media, Politik, dan Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.

- Jeff Zaleski. (1999). *Spiritualitas Cyberspace: Bagaimana Teknologi Komputer Mempengaruhi Kehidupan Keberagamaan Manusia*. Bandung: Mizan.
- John S Oakland. (1995). *Total Quality Management*. Oxford: Butterwirt.
- Jujun Suriasumantri. (1999). *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kemendiknas. (2010). *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Blitbang Pusat Kurikulum Kemendiknas.
- Koentowidjojo. (1984). *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Prima Duta.
- Laluhang, S. M. (2015). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kendabe II Kecamatan Kendabe Kabupaten Sangihe*. *Jurnal Eksekutif*, 1(7).
- Langgulung, H. (1992). *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Laugksch, C. R. (2000). *Scientific Literacy: A Conceptual Overview*. *Science Education*, 71-94.
- Luthfi Assyaukanie. (1994). *Islam dalam Konteks Pemikiran Pasca Modernisme*. dalam jurnal *Ulumul Qur'an*, No.1, vol. V, Tahun 1994.
- Madan Sarup. (1993). *Post-Structuralism and Postmodernism*. Athens: The University of Georgia Press.
- Majelis Ulama Indonesia. (1995). *Air, Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan Menurut Ajaran Islam*. Jakarta: MUI.

- Mark Slouka. (1999). *Ruang yang hilang: Budaya Cyberspace yang Merisaukan*. Bandung: Mizan.
- Markum, M. E. (2009). *Pengentasan kemiskinan dan pendekatan psikologi sosial*. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1(1), 1-12.
- Midgley, J. (1995). *Social Development, The Developmental Perspective In Social Welfare*. London: SAGE Publications.
- Mircea Elliade. (1968). *The Encyclopedia of Religion, vol. 7*, New York: McMillan.
- Mubah, A. S. (2011). Strategi Meningkatkan Daya Tahan Budaya Lokal dalam Menghadapi Arus Globalisasi. *Jurnal Unair*, 24(4).
- Muhtar, M., & Huruswati, I. (2015). *Pelayanan Satu Pintu Penanggulangan Kemiskinan Di Sragen*. *Sosio Konsepsia*, 5(1), 277- 291.
- Mulyono. (2011). Model Integrasi Sains dan Agama dalam Pengembangan Akademik Keilmuan UIN. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 7(2), 319- 338.
- Muqoyyidin, W. A. (2014). Integritasi dan interkoneksi Ilmu-Ilmu Agama dan Sains Menuju Pendidikan Tinggi Islam Center of Excellences. *Edusentris*, 1(2), 171-182.
- Murdiansyah, I. (2014). *Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang)*. *WIGA-Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 4(1), 71-92.
- Muslih, M. (2010). Pengaruh Budaya dan Agama Terhadap Sains: Sebuah Survey Kritis. *Jurnal Tsaqafah*, 6(2), 225- 247.
- OECD. (2016).
- Niebuhr, Richard. L. (1953). *Crist and Culture*, New York: Harvard and Row.

- Nur Syam. (2005). *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKiS.
- _____. (2007). *Mazhab-Mazhab Antropologi*. Yogyakarta: LKiS.
- Noll, Heinz-Herbert. (2004). *The European System of Social Indicators: A Tool for Welfare Measurement and Monitoring Social Change (Workshop on Measurement of Wellbeing in Developing Countries Hanse Kolleg, Delmenhorst, July 2-4, 2004)*.
- Nurcholis Madjid. (1995). *Islam Agama Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina.
- Otto Soemarwoto. (1983). *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Jembatan.
- Paisun. (2010). *Dinamika Islam Kultural: Dialektika Islam dan Budaya Madura*,” Jurnal EL-Harakat Vol. 12 No.2 edisi Juli Desember 2010.
- Paulin Marie Rosenaw. (1992). *Postmodernism and Sosial Science*. New Jersey: Princeton University.
- Pattinama, M. J. (2009). *Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal (Studi Kasus Di Pulau Buru-Maluku dan Surade- Jawa Barat)*. Jurnal Makara Sosial Humaniora, 13(1), 1- 12.
- Payne, M. (2005). *Modern Social Work Theory (Third ed.)*. New York: Palgrave Macmillan.
- PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy. Paris: OECD Publishing. doi:10.1787/9789264255425-en
- Pramono, M. F., & Martono, E. (2011). *Harmoni Nilai Agama dan Nilai Ilmiah: Belajar Pengalaman Dunia Islam dan Eropa*. Jurnal At-Ta'dib, 6(2), 205-222.

- Prawoto, N. (2008). *Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya*. JESP: Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 9(1), 56-68.
- Purwanto, A. B. (2016). *Peran Lembaga Layanan Terpadu Dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Kota Payakumbuh)*. Sosio Konsepsia, 5(3), 205-216.
- Rodney Stark. (1985). *Sociology*, California: Wadsworth Publishing Company.
- Royat, S. (2007). *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Materi Assisten Deputi Menko Kesra Bidang Penanggulangan Kemiskinan.
- Rustam Ibrahim (ed.) (1997). *Agenda LSM Menyongsong Tahun 2000*. Jakarta: CESDA dan LP3ES.
- Sakata, Hiromi, Lorraine. (1983). *Music in Mind: the Concepts of Music and Musician in Afghanistans*. Ohio: The Kent State University Press.
- Satrio Arismunandar. (1993). *Islam di Mata Media Massa Barat*. Jurnal Islamika, No.1, Juli-September, 1993.
- Subadio Haryati. (1986). *Kepribadian Budaya Bangsa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Rafika Aditama.
- Suryawati, C. (2005). *Memahami Kemiskinan secara Multidimensional*. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 8 (3).
- Sayyed Hosein Nasr. (1994). *Islam dan Krisis Lingkungan*, Jurnal Islamika, No.3, Januari-Maret 1994.

- Syamsul Arifin. (1994). *Agama dan Masa Depan Ekologi Manusia*. Jurnal Ulumul Qur'an, edisi Khusus, no.5 & 6, vol. V, tahun 1994.
- Taufiq, A. (2010). *Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal (Belajar dari Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak)*. Doctoral dissertation, Diponegoro University.
- Utami, T. (2014). *Pemberdayaan Komunitas Sektor Informal Pedagang Kaki Lima (Pkl), Suatu Ternaltif Penanggulangan Kemiskinan*. Jurnal Sosiologi DILEMA, 25(2).
- Wahid, Abdurahman. (1981). *Muslim di Tengah Pergumulan*. Jakarta: LEPPENAS.
- _____. (2001). *Pergulatan Negara, Agama dan Budaya*. Jakarta: Destra.
- W.C. Smith. (1981). *Toward a World Theology: Faith and Comparative History of Religion*, London: The Macmillan Press Lmd.
- Ward, T., & Birgden, A. (2007). *Human Rights and Correctional Clinical Practice (Elsevier, 12)*. Aggression and Violent Behavior, 628-643.
- Waqar Ahmed Husaini. (1983). *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*. Bandung: Pustaka Salman.
- Woodward, Mark. R. (2001). *Islam Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*. Yogyakarta: LKIS.
- Yasa, M. (2008). *Penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat di Provinsi Bali*. Input Jurnal Ekonomi dan Sosial, 1(2).

- Yulaswati, Vivi. (2017). *Strategi dan Program- Program Penanggulangan Kemiskinan*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Yusuf Qardhawi. (1999). *Anatomi Masyarakat Islam*, Jakarta: Pustaka AL Kautsar.
- Zaim Saidi. (2000). *Islam Tradisional dan Krisis Lingkungan: Pandangan Seorang Aktivistis*. Jurnal Islamika, No.3, Januari-Maret, Tahun 2000.
- Zastrow, C. (2004). *Introduction To Social Welfare (Eight Edition ed.)*. USA: Thomson Brooks/Cole.
- Zubaedi. (2008). *Revitalisasi Tabot Untuk Membangun Kerukunan Umat Beragama Bengkulu di Bengkulu*. Jurnal Harmoni Depag RI Vol.VII No. 27 Juli September 2008.

BIOGRAFI PENULIS



Zaenudin Amrulloh, lahir tanggal 08 Agustus 1992 di Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Peneliti ini telah menamatkan pendidikan sekolah Dasar di Madrasah Ibtidaiyah Islahul Muta'alim Pagutan Mataram, kemudian menyelesaikan pendidikan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri.

Kemudian menyelesaikan pendidikan sarjana di UIN Sunan Kalijaga Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) tahun 2014. Di tahun berikutnya menyelesaikan pendidikan pasca sarjana di UGM pada Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan tahun 2017.

Terhitung Maret 2019, peneliti diamanahi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Dosen Tetap Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Mataram. Sejak tahun 2019 menjadi *Editor in Chief* Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Selain itu, kini peneliti juga duduk sebagai Sekretaris Program Studi (Prodi) Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Tahun 2021-2025. Selain membimbing kegiatan mahasiswa, peneliti juga aktif menerbitkan jurnal ilmiah yang dapat dilihat melalui ID Sinta: 6797924.